

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umat beragama di Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai permasalahan utamanya tentang kerukunan dan toleransi beragama. Fenomena yang kita lihat sekarang ini; kerukunan antarumat beragama di Indonesia masih banyak menyisakan masalah bahkan semakin pelik dan susah untuk diselesaikan.

Kasus-kasus yang muncul terkait dengan ketidakrukunan dalam beragama belum bisa terhapus secara tuntas dan membuahkan solusi yang menggembirakan. Kasus ketidakrukunan terbaru yang akhir-akhir ini terjadi di Ibukota Jakarta, Tanjung Balai dan Tolikara Papua sangat menyita perhatian masyarakat, belum lagi jika kita mengingat kasus Ambon, Kupang, Poso, dan lainnya yang masih menyisakan masalah; ibarat api dalam sekam yang sewaktu-waktu siap membara dan memanaskan suasana di sekelilingnya untuk kesekian kalinya. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat tentang kerukunan antarumat beragama perlu mendapatkan perhatian serius dan sangat penting untuk ditinjau ulang.

Banyaknya konflik yang melibatkan agama sebagai pemicunya menuntut adanya perhatian yang serius untuk mengambil langkah-langkah yang antisipatif demi damainya kehidupan umat beragama di Indonesia pada masa-

masa yang akan datang. Apabila hal-hal seperti ini terus diabaikan dan tidak mendapatkan perhatian serius, maka dikhawatirkan akan muncul masalah yang lebih berat dan ditakutkan akan mengganggu stabilitas pembangunan bangsa dan negara di tiap sendi pembangunannya, bidang politik, ekonomi, keamanan, budaya, dan bidang-bidang lainnya ditakutkan akan terganggu perkembangannya.

Adanya perubahan kondisi seperti sekarang ini seharusnya meningkatkan kesadaran masyarakat kita akan arti penting persatuan dan kesatuan. Akan tetapi kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Angin reformasi membawa dampak kebebasan yang kurang terkendali. Hal ini akan sangat berbahaya ketika terjadi di tengah-tengah bangsa yang tingkat heterogenitasnya cukup tinggi seperti Indonesia. Rakyat Indonesia mencita-citakan suatu masyarakat yang cinta damai dan diikat oleh rasa persatuan nasional untuk membangun sebuah negara yang majemuk. Persatuan ini tidak lagi membeda-bedakan agama, etnis, golongan, kepentingan, dan yang sejenisnya.

Pengkajian tentang hubungan antarumat beragama dan antar etnis sekarang ini memasuki tantangan baru dan semakin menarik untuk diteliti dan didiskusikan. Hal ini disebabkan antara lain karena munculnya konflik-konflik bernuansa SARA (Suku, Ras, Agama dan Antar Golongan) dan perubahan dinamika hubungan sosial dan keagamaan yang terjadi dilapangan. Berbagai peristiwa yang sempat menggejolak disebagian wilayah Indonesia beberapa tahun terakhir menunjukan indikasi bahwa telah terjadi pergeseran hubungan

antar agama dan antar etnis di negeri ini. Kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di Indonesia adalah tanggapan terhadap ketimpangan sosial ekonomi, penggusuran ekonomi oleh pendatang, legitimasi politik yang menurun, dan pandangan mengenai ancaman terhadap identitas kelompok. Dalam sejumlah kasus, kerusuhan itu melibatkan keluhan yang lebih langsung atas hak-hak praktik beragama. Penggunaan identitas agama menuntut penjelasan melampaui berbagai sebab kekerasan yang bersifat langsung.¹

Beberapa tahun terakhir, isu agama begitu cepat menyebar ke berbagai lapisan sehingga tercipta kerentanan yang cukup menegangkan dalam kehidupan beragama masyarakat. Sedikit saja tersentuh ego keagamaan atau etnis suatu kelompok, maka reaksi yang ditimbulkan sangat besar dan terkadang berlebihan. Yang lebih menyedihkan, reaksi tersebut cenderung berupa kekerasan dengan berbagai tingkat eskalasinya. Eskalasi kekerasan dengan berbaju SARA ini telah menciptakan suasana kehidupan yang tegang dan meresahkan. Dalam suasana seperti ini agama seringkali dijadikan titik singgung paling sensitif dan eksklusif dalam pergaulan pluralitas masyarakat.

Dalam sejarah bangsa Indonesia, kemajemukan telah melahirkan perpaduan yang sangat indah dalam berbagai bentuk mozaik budaya. Berbagai suku, agama, adat istiadat dan budaya dapat hidup berdampingan dan memiliki ruang negoisasi yang sangat tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, keragaman

¹Jacques Bertrand, *Nasionalisme dan Konflik Etnis di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), hal. 179-180

yang terajut indah itu kini terkoyak dan tercabik-cabikoleh sikap eksklusif yang tumbuh dari akar *primordialisme* sempit kesukuan, agama dan golongan. Peristiwa konflik atau kerusuhan terjadi di beberapa daerah, baik dalam eskalasi kecil maupun besar dengan membawa korban harta, manusia, bangunan perkantoran maupun perdagangan dan lainnya, sehingga menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan dan kebangsaan kita.²

Dalam perjalanan sejarah Indonesia, ketegangan dan konflik etnis, agama, budaya, dan politik belum juga menurun dan masih menjadi bagian potret interaksi masyarakat. Sejak menjelang kemerdekaan hingga era reformasi sekarang ini, perbedaan-perbedaan lebih sering menjelma menjadi pertentangan, sehingga pada gilirannya melahirkan ketidaknyamanan hidup bersama dan tidakproduktifan. Pergantian rezim seakan tidak berbanding lurus dengan pergantian mental dan budaya konflik dan kekerasan, sementara masyarakat tidak harmonis dalam perbedaan itu.³

Namun fenomena konflik yang dilatar-belakangi agama dan budaya diatas berbanding terbalik dengan fenomena yg penulis jumpai pada perawat di Rumah Sakit Umum Putera Bahagia Kota Cirebon. Rumah Sakit Umum Putera Bahagia ini penulis pilih sebagai tempat penelitian karena berbagai sebab. Sebelumnya penulis telah melakukan studi pendahuluan di rumah sakit umum

²Depag RI. *Konflik Sosial Bernuansa Agama Di Indonesia*, (Departemen Agama RI BadanLITBANG Agama dan Keagamaan PUSLITBANG Kehidupan Beragama Bagian Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama tahun 2003), hal. 1-2

³Ibid., hal. 87-88

daerah milik pemerintah, yakni RSUD Arjawinangun dan RSUD Gunung Jati. Dari hasil studi pendahuluan tersebut, pegawai pendidikan dan pelatihan (Diklat) dari masing-masing rumah sakit tersebut memberikan arahan agar tidak melakukan penelitian di dua instansi tersebut karena kurangnya mobilitas dan tingkat berkumpul perawat yang berbeda agama dalam satu tempat dan waktu. Hal ini menurut mereka akan menghambat proses penelitian, sehingga pada akhirnya peneliti memilih rumah sakit umum Putera Bahagia sebagai tempat penelitian mengingat kemajemukan perawat yang berbeda dapat berkumpul dalam satu tempat dan waktu sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian. Hal unik lainnya adalah karena secara umum rumah sakit ini milik Kristiani, sehingga diduga ada potensi mendiskreditkan perawat muslim dalam segala bentuk aktifitas di tempat kerjanya termasuk dalam masalah peribadatan dan pengamalan keagamaanya.

Kemudian setelah melakukan studi pendahuluan di rumah sakit tersebut, tampak perawat yang bekerja dan meniti karir di Rumah Sakit Umum Putera Bahagia Kota Cirebon bersosialisasi dalam banyak perbedaan. Dan yang menjadi perbedaan mendasar pada perawat tersebut adalah perbedaan agama pada masing-masing individunya. Suatu hal yang perlu diketahui disini adalah bahwa perbedaan yang ada pada perawat di lingkungan rumah sakit umum tersebut tidaklah menjadikan mereka menjadi tidak baik dan tidak nyaman dalam bekerja, atau memicu ketegangan hingga menimbulkan suatu konflik seperti konflik-konflik yang sering terjadi dewasa ini yang dilatarbelakangi oleh

perbedaan agama, namun kebersamaan mereka dalam satu tempat kerjajustru sangat harmonis, bisa hidup secara berdampingan dalam satu ruangan yang tidak terlalu luas, dan sangat menjunjung tinggi toleransi dalam beragama. Yang mana pada setiap individu perawat tersebut bukan hanya mengakui keberadaan hak agama lain, tetapi juga terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan dari setiap masing-masing penganut agama yang ada. Faktanya, bahwa setiap perawat yang berbeda agama dapat berinteraksi secara positif dalam lingkungan kemajemukan.

Dengan latar belakang tersebut, penulis bermaksud mengadakan penelitian mengenai **“IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DALAM MASYARAKAT (Studi Kasus pada Profesi Perawat di Rumah Sakit Umum Putera Bahagia Kota Cirebon Tahun 2017)**

B. Perumusan Masalah

1. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada penulisan tesis ini masih pada wilayah kajian Pendidikan Agama Islam (PAI) yang berkaitan tentang perilaku keberagamaan dan sosiologi pendidikan Islam dengan lingkup kajian pengamalan kehidupan beragama di masyarakat.

2. Identifikasi Masalah

Dari masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diambil identifikasi masalahnya sebagai berikut:

- a. Terdapat beberapa agama yang dianut oleh perawat di Rumah Sakit Putera Bahagia Kota Cirebon yang mengedepankan budaya kebersamaan.
- b. Terdapat ketidaksesuaian pemahaman dengan praktik berkehidupan perawat tentang arti dari kerukunan antarumat beragama.
- c. Terjadi ketidakfahaman perawat tentang konflik/disharmoni diantara pemeluk agama di Rumah Sakit Putera Bahagia Kota Cirebon
- d. Terjadi ketidakfahaman perawat tentang dialog antarumat beragama di Rumah Sakit Putera Bahagia.

3. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Oleh karena itu penulis memfokuskan kepada pembahasan atas masalah-masalah pokok yang dibatasi dalam konteks implementasi nilai-nilai kerukunan umat beragama. Obyek yang diteliti adalah pada perawat di lingkungan Rumah Sakit Putera Bahagia Kota Cirebon.

4. Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan perawat di Rumah Sakit Putera Bahagia Kota Cirebon tentang kerukunan antarumat beragama?
2. Bagaimana pandangan perawat tentang konflik antarumat beragama di Rumah Sakit Putera Bahagia Kota Cirebon?

3. Bagaimana pandangan perawat tentang dialog antarumat beragama di Rumah Sakit Putera Bahagia Kota Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan perawat Rumah Sakit Putera Bahagia Kota Cirebon tentang kerukunan antarumat beragama.
2. Untuk mengetahui pandangan perawat tentang konflik antarumat beragama di Rumah Sakit Putera Bahagia Kota Cirebon.
3. Untuk mengetahui pandangan perawat tentang dialog antarumat beragama di Rumah Sakit Putera Bahagia Kota Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini baik secara teoritik-akademik maupun praktis adalah:

1. Secara praktis akademik

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah referensi kepustakaan referensi bagi penelitian lainnya yang hendak meneliti terkait tema yang sama.

2. Secara filosofis akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta pemahaman teoritis mengenai penanaman sikap rukun antarumat beragama dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

3. Secara sosial akademik

Bagi masyarakat penelitian ini dapat memberikan informasi dan pemahaman mengenai sikap rukun beragama yang baik sebagai sarana meningkatkan kemaslahatan antarumat beragama.

4. Secara konseptual

Hasil penelitian ini berguna bagi penemuan konsep baru sesuai disiplin ilmu dan dapat memberikan wawasan serta pemahaman tentang bagaimana menumbuhkan sikap rukun antarumat beragama.

E. Kerangka Pemikiran

Semua penelitian memerlukan kerangka pikir sebagai pijakan dalam menentukan arah penelitian supaya penelitian terfokus. Alur kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, penuh budaya, adat istiadat, bahasa, suku, dan juga agama. Dalam masyarakat ada nilai kehidupan yang terkandung, ada norma yang dipegang, serta prinsip hidup yang menjadi keyakinan masing-masing individunya.

Dalam masyarakat, juga terdapat berbagai macam unsur kehidupan, ada aktifitas masyarakatnya yang beragam dan ada profesi yang bermacam-macam untuk melangsungkan kehidupan kemasyarakatannya. Dari profesi tersebut ada guru, teknisi, birokrat, dokter, perawat, maupun lain sebagainya.

Berbicara mengenai perawat, perawat merupakan bagian dari masyarakat. Perawat juga merupakan sebuah profesi di tengah masyarakat yang majemuk, kehadirannya ditunggu masyarakat untuk memberikan pelayanan keperawatan; di puskesmas, rumah sakit, pusat-pusat klinik kesehatan dan perawatan, maupun lainnya.

Dalam setiap individu perawat juga terkandung berbagai unsur dan nilai-nilai kemasyarakatan. Masyarakat yang punya bermacam suku, perawat juga berasal dari bermacam suku. Masyarakat punya beragam budaya, perawat juga mempunyai beragam budaya. Perawat mempunyai beragam agama itupun tidak lepas dari kodratnya sebagai bagian dari masyarakat yang mempunyai beragam agama dan kepercayaan.

Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat yang beragama. Perawat tidak bisa melepaskan diri dari nilai-nilai keberagamaan. Adanya beragam agama di lingkungan perawat, menuntut perawat untuk bisa hidup berdampingan, rukun, dan penuh kasih sayang antar-sesama. Sikap ini penting karena kedamaian dan kebahagiaan hidup akan tercipta jika anggota masyarakatnya mampu hidup rukun dan berdampingan dengan sesama dimanapun mereka berada.

Menurut Taher Kerukunan diartikan sebagai kehidupan bersama yang diwarnai oleh suasana baik dan damai, hidup rukun berarti tidak bertengkar, melainkan bersatu hati, dan sepakat dalam berfikir dan bertindak demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Didalam kerukunan semua orang bisa hidup bersama tanpa kecurigaan, dimana tumbuh semangat dan sikap saling menghormati dan kesediaan untuk bekerja sama demi kepentingan bersama. Kerukunan atau hidup rukun adalah sikap yang berasal dari lubuk hati yang terdalam, terpancar dari kemauan untuk memang berinteraksi satu sama lain sebagai manusia tanpa tekanan dari pihak manapun.⁴

Untuk mencapai kerukunan antarumat beragama, perlu adanya penerapan atau implementasi dari nilai-nilai luhur kerukunan antarumat beragama. Menurut Nurdin Usman, implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁵ Dari penjelasan implementasi tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya tindakan/aksi yang nyata dalam menjalani nilai-nilai kerukunan kehidupan beragama saat ini begitu penting untuk dilakukan.

Adapun nilai-nilai kerukunan itu antara lain diraih melalui pemahaman yang baik akan kerukunan, pemahaman yang bukan saja mengerti ilmu, namun mampu mengaplikasikan pemahamannya ke dalam perilaku kesehariannya.

⁴ Taher, Elza Peldi, *Merayakan Kebebasan Beragama Bunga Rampai 70 Tahun DjohanEffendi* (Jakarta: ICRP, 2009), hal. 84

⁵Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Bandung: Alfabeta, 2002) hal. 70

Pemahaman melalui cara pandang yang baik juga bisa mencerminkan tingkah laku yang baik.

Tidak menyulut konflik atau pertentangan juga merupakan nilai dan cara untuk mencapai kerukunan. Karena konflik bisa diartikan “perseteruan menyangkut nilai, klaim dan identitas yang melibatkan isu-isu keagamaan atau isu-isu yang dibingkai dalam slogan atau ungkapan keagamaan”.⁶ Maka jelas, adanya konflik dapat meruntuhkan nilai-nilai yang terkandung dalam kerukunan antarumat beragama.

Dalam hidup bermasyarakat, manusia tidak bisa jauh dengan interaksi dan komunikasi dengan manusia lain, masing-masing akan selalu ketergantungan untuk mencapai posisi yang ideal dalam masyarakat. Namun walaupun begitu, menurut Devito; adanya interaksi yang disebut komunikasi antara individu yang satu dengan yang lainnya, tak dapat disangkal akan menimbulkan konflik dalam level yang berbeda-beda.⁷

Hal lain yang dapat memurnikan dan meningkatkan kerukunan adalah dengan melakukan dialog antarumat beragama. Adanya dialog antarumat beragama juga merupakan cerminan bagaimana umat beragama menunaikan kerukunan. Dialog juga bisa digunakan untuk media peredam konflik dan juga media untuk mempererat jalinan kasih antar-pemeluk agama.

⁶ Ihsan Ali Fauzi dkk., *Pola-pola Konflik Keagamaan di Indonesia (1990-2008)*, Jakarta: Hasil Penelitian, 2009, hal. 7

⁷ Joseph A. Devito. *The Interpersonal Communication Book*. Edisi 7. America: Harper Collins College Publisher, 1995. hal.381

Leonard Swidler, akademisi yang paling terkenal dalam bidang dialog antar agama mendefinisikan dialog antar agama sebagai suatu pembicaraan antar individu dan lewat itu juga melibatkan dua atau lebih komunitas atau kelompok agama dengan pandangan yang berbeda-beda. Tujuan utama dari perjumpaan ini adalah setiap peserta belajar dari pihak lain sehingga ia dapat berubah dan bertumbuh, lantas perspektif kelompok atau komunitasnya juga mengalami hal serupa.⁸

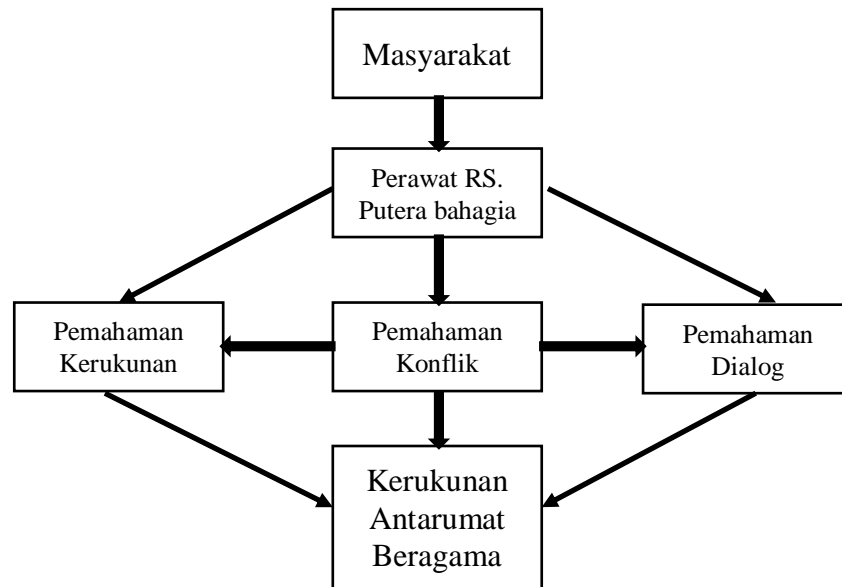
Dari dialog, kemudian perspektif dapat berubah, perilaku yang baik dapat bertumbuh, dan tingkat intelektualitas menjadi semakin tajam. Menurut Menurut Hendropuspito dalam Adon Nasrullah,⁹ dialog ialah percakapan antara dua orang (atau lebih) dalam mana diadakan pertukaran nilai yang dimiliki masing-masing pihak. Jadi, dialog antarumat beragama adalah temu wicara antara dua atau lebih pemeluk agama yang berbeda, yang didalamnya diadakan pertukaran nilai dan informasi keagamaan pihak masing-masing untuk mencapai bentuk kerjasama dalam semangat kerukunan.

Maka ketika sudah terjadi pemahaman yang baik, kemudian lepas dari konflik, lalu ada media pemersatu seperti dialog lintas agama. Maka nilai-nilai kerukunan akan mudah untuk diimplementasikan. Dampak besarnya adalah menciptakan sumbangsih kedamaian dan kerukunan untuk masyarakat luas yang lebih beragam lagi.

⁸Leonard Swidler, *Toward a Universal Theology of Religion* (Maryknoll, NY: Orbis Books: 1987) hal. 6

⁹ Adon Nasrullah Jamaludin, *Agama & Konflik Sosial*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015, hal. 116

Berdasarkan uraian diatas, alur pikir yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Bagan 1. Kerangka Berpikir

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini dimaksudkan sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna memberi kejelasan dan batasan tentang informasi yang digunakan sebagai khazanah pustaka, terutama yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas. Kajian pustaka ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak diperlukan.

Setelah penulis coba telusuri mengenai tema kerukunan beragama ini, ada beberapa karya ilmiah yang ternyata mengupas tentang hal sama, namun sejauh

ini penulis belum menemukan penelitian yang memfokuskan pada studi atas tiga agama mengenai bagaimana agama-agama tersebut menanamkan sikap rukun terhadap pemeluknya yang sedang berada pada satu tempat dengan umat lain. Beberapa karya ilmiah yang penulis anggap cukup mendekati pada penelitian ini antara lain, yaitu:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Toto Suryana dalam Jurnal yang berjudul “Konsep dan Aktualisasi Kerukunan Antarumat Beragama”. Hasil menunjukkan bahwa keberagaman merupakan realita dan ketentuan dari Allah Tuhan semesta alam, maka diperlukan rasa penerimaan dan usaha untuk memelihara dengan mengarahkannya kepada kepentingan dan tujuan bersama. Perbedaan yang terjadi merupakan fakta yang harus disikapi secara positif sehingga antar pemeluk agama terjadi hubungan kemanusiaan yang saling menghargai dan menghormati. Agama bersifat universal, tetapi beragama tidak mengurangi rasa kebangsaan, bahkan menguatkan rasa kebangsaan. Agama mendorong penganutnya untuk membela kehormatan dan kedaulatan bangsa dan negaranya. Pluralitas merupakan sebuah fakta sosial historis yang melekat pada kebudayaan Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang plural dan multikultural. Menjadi manusia Indonesia berarti menjadi manusia yang sanggup hidup dalam perbedaan dan bersikap toleran. Bersikap toleran berarti bisa menerima

perbedaan dengan lapang dada, dan menghormati hak pribadi dan sosial pihak yang berbeda menjalani kehidupan mereka.¹⁰

Perbedaan dari penelitian diatas dengan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pada bentuk penelitiannya. Toto Suryana hanya ingin mengetahui tentang teori kerukunan beragama sedangkan peneliti akan mencoba meneliti langsung lewat studi kasus di lapangan disandingkan dengan teori yang sudah ada.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Dhian Nofita Nuril Farda¹¹ dengan judul Konsep Toleransi dan Implementasinya dalam Perspektif agama-agama (studi kasus interaksi lintas agama di Prambanan). Penelitian ini merupakan penelitian sosial yang memfokuskan penelitian pada konsep toleransi dalam perspektif agama-agama dan implementasinya di wilayah Prambanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi toleransi lintas agama-agama di wilayah Prambanan. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa dalam setiap agama memiliki konsep toleransi masing-masing, secara tegas setiap agama menganjurkan untuk membangun semangat persaudaraan dengan semua manusia tanpa memandang ras, suku, dan agama. Dalam pandangan tokoh-tokoh agama di Prambanan toleransi merupakan sikap menghargai terhadap kebenaran ajaran agama yang

¹⁰Toto Suryana, *Konsep dan Aktualisasi Kerukunan Antarumat Beragama*, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim, Vol. 9, No. 2, 2011

¹¹Dhian Nofita Nuril Farda, *Konsep Toleransi dan Implementasinya dalam Perspektif Agama-Agama (Studi Kasus Interaksi Lintas Agama di Prambanan)*. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011

dimiliki dan diyakini orang lain dan agama lain, tidak menganggap bahwa hanya dialah pemegang kebenaran tunggal secara absolut (truth claim). Sedangkan implementasi toleransi lintas agama di Prambanan mengambil berbagai macam bentuk, namun yang paling banyak terlihat secara nyata dalam beberapa aktivitas sosial dan budaya.

Perbedaan dari penelitian diatas dengan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pada objek penelitian. Dhian ingin mengetahui bagaimana agama-agama di wilayah Prambanan memandang konsep toleransi serta bagaimana implementasinya. Sedangkan apa yang peneliti ingin ketahui adalah bagaimana nilai-nilai kerukunan umat beragama dapat diimplementasikan di lingkungan publik seperti ruang perawatan di rumah sakit.

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Yudi Sulaiman tentang “Pembinaan Kesadaran Pluralisme Agama dikalangan Narapidana Lembaga Perasyarakatan Anak di Blitar”. Hasil menunjukkan bahwa Manfaat yang ditimbulkan dari pembinaan kesadaran pluralisme agama di kalangan LP. Anak di Blitar adalah bertambahnya semangat para narapidana untuk hidup dalam perbedaan dan terciptanya saling menghormati, menghargai, menyayangi, dan saling tolong-menolong terhadap agama lain. Pembinaan keagamaan yang dilakukan para pembina ataupun agamawan menimbulkan dampak positif bagi narapidana yaitu dengan terciptanya kerukunan

beragama, baik antar-intern agama maupun antar-narapidana yang berlainan agama.¹²

Perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang penulis teliti adalah dari segi obyek penelitiannya, Yudi Sulaiman dalam penelitiannya fokus terhadap pembinaan kesadaran pluralisme, sedangkan penulis lebih terfokus pada bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai kerukunan yang terjadi di tengah masyarakat yang tengah berkumpul dalam satu tempat atau satu ruangan.

d. Penelitian yang dilakukan oleh Kajian LEMHANAS RI tentang “Membangun Kerukunan Umat Beragama Guna Terwujudnya Harmonisasi Kehidupan Masyarakat Dalam Rangka Ketahanan Nasional”. Hasil menunjukkan bahwa:

- 1) Bangsa Indonesia memiliki heterogenitas dalam bidang agama. Perbedaan ini merupakan kekuatan, namun berpotensi menjadi ancaman konflik sosial bernuansa agama yang terjadi berulang kali dan sulit dihilangkan. Oleh karena itu diperlukan upaya komprehensif dari segenap elemen bangsa untuk menangani dan mengantisipasinya kedepan.
- 2) Kerukunan hidup umat beragama mengandung arti kesediaan untuk menerima perbedaan keyakinan individu maupun kelompok lain,

¹²Yudi Sulaiman, *Pembinaan Kesadaran Pluralisme Agama Dikalangan Narapidana Lembaga Permasyarakatan Anak di Blitar*, skripsi pada STAIN Kediri, 2004, hal. 60-61

kesediaan memberi kebebasan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakininya dan kemampuan untuk bersikap simpati dan empati pada suasana kekhusyukan yang dirasakan orang lain.

- 3) Kerukunan umat beragama merupakan suatu keadaan yang dinamis. Hal tersebut sangat tergantung pada sikap dan respons dari masyarakat umat beragama terhadap permasalahan yang dapat memicu terjadinya konflik.¹³

Dari penjelasan diatas, kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian diatas berbeda dengan apa yang penulis teliti, LEMHANAS RI mencoba membangun argumentasinya tentang harmonisasi kehidupan masyarakat dengan cara membangun kerukunan, sedangkan penulis mencoba membangun argumentasi tentang pentingnya menerapkan nilai-nilai kerukunan yang ada di tengah masyarakat melalui kehidupan beragama.

- e. Penelitian yang dilakukan oleh Marzuki tentang “Kerukunan Antarumat Beragama dalam Wacana Masyarakat Madani: Analisis Isi Piagam Madinah dan Relevansinya Bagi Indonesia”¹⁴. Hasil penelitiannya menunjukkan:
 - 1) Piagam Madinah adalah kumpulan naskah yang berisi perjanjian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan kaum Muslim, baik dari

¹³LEMHANAS RI, *Membangun Kerukunan Umat Beragama Guna Terwujudnya Harmonisasi Kehidupan Masyarakat Dalam Rangka Ketahanan Nasional*, Jurnal Kajian LEMHANAS RI, edisi 14, Desember, 2012.

¹⁴Marzuki, *Kerukunan Antarumat Beragama dalam Wacana Masyarakat Madani: Analisis Isi Piagam Madinah dan Relevansinya Bagi Indonesia*, dalam Jurnal, 2006.

golongan Muhajirin maupun golongan Anshar, dan perjanjian antara Nabi Muhammad SAW dengan kaum Yahudi di Madinah. Piagam ini terdiri dari 47 pasal yang mengatur masalah kesatuan umat (bangsa) di Madinah, kesediaan untuk saling membantu, saling menasehati, saling membela, dan menghormati kebebasan beragama.

- 2) Piagam Madinah mengatur dengan tegas kebebasan beragama bagi para penganut agama yang ada di Madinah, terutama kaum Muslim dan kaum Yahudi. Sebagai kepala negara, Nabi menjamin hak semua rakyat Madinah, baik Muslim maupun non-Muslim dalam melakukan aktivitas keagamaan. Nabi akan menindak tegas siapa pun yang melakukan pengkhianatan terhadap perjanjian yang sudah dibuat dalam Piagam Madinah.
- 3) Kerukunan umat beragama di Indonesia pada prinsipnya sudah di atur dengan baik. Berbagai aturan sudah dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakannya. Aturan-aturan ini tidak jauh berbeda dengan aturan yang tertuang dalam Piagam Madinah. Jika pada akhirnya muncul berbagai konflik antarumat beragama di Indonesia, hal ini tidak semata-mata terkait dengan masalah agama belaka, tetapi sudah ditunggangi oleh berbagai kepentingan, terutama kepentingan politik.

Perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada isi/substansi dari penelitian tersebut. Secara garis besar penelitian tersebut menjelaskan tentang bagaimana isi dari piagam

Madinah yang terjadi beratus tahun silam dapat direlevansikan kedalam kehidupan beragama pada masa sekarang, sedangkan penulis pada penelitian ini akan mencoba mendeskripsikan bagaimana nilai-nilai kerukunan dapat diterapkan kedalam ruang publik yang lebih nyata dan faktual melalui studi kasus yang langsung bersinggungan dengan tempat penelitian yang penulis lakukan.

G. Landasan Teori

Salah satu ciri penelitian ilmiah adalah adanya landasan teoritis di dalamnya. Setiap penelitian selalu menggunakan teori. Menurut Neumen dalam Sugiyono¹⁵, teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.

Adapun landasan teori yang menunjang penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kerukunan Antarumat Beragama

a. Pengertian Kerukunan Antarumat Beragama

Secara etimologis kata kerukunan berasal dari bahasa Arab, yaitu “*rukun*” yang berarti tiang, dasar, atau *sil*. Jamak dari “*rukun*” ialah “*arakan*” yang berarti bangunan sederhana yang terdiri atas berbagai

¹⁵Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung. 2012. hal. 81-82

unsur. Jadi, kerunan itu merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas berbagai unsur yang berlainan dan setiap unsur tersebut saling menguatkan.¹⁶

Kerukunan diartikan adanya suasana persaudaraan dan kebersamaan antara semua orang meskipun mereka berbeda secara suku, agama, ras dan golongan. Kerukunan juga bisa bermakna suatu proses untuk menjadi rukun karena sebelumnya ada ketidakrukunan serta kemampuan dan kemauan untuk hidup bersama dengan damai serta tentram.

Kerukunan juga diartikan sebagai kehidupan bersama yang diwarnai oleh suasana baik dan damai, hidup rukun berarti tidak bertengkar, melainkan bersatu hati, dan sepakat dalam berfikir dan bertindak demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Didalam kerukunan semua orang bisa hidup bersama tanpa kecurigaan, dimana tumbuh semangat dan sikap saling menghormati dan kesediaan untuk bekerja sama demi kepentingan bersama. Kerukunan atau hidup rukun adalah sikap yang berasal dari lubuk hati yang terdalam, terpancar dari kemauan untuk memang berinteraksi satu sama lain sebagai manusia tanpa tekanan dari pihak manapun.¹⁷

¹⁶ H. Said Agil Husin Al Munawar, *Fikih hubungan Antar-Agama* (Jakarta:Ciputat Press, 2003), hal. 4

¹⁷ Taher, Elza Peldi, *Merayakan Kebebasan Beragama Bunga Rampai 70 Tahun DjohanEffendi* (Jakarta: ICRP, 2009), hal. 84

Sementara dalam kaitan sosial, rukun diartikan dengan adanya yang satu mendukung keberadaan yang lain. Dengan demikian kerukunan dalam konteks sosial merupakan norma yang sepatutnya diimplementasikan agar terwujudnya masyarakat madani yang saling peduli dan mendukung eksistensi masing-masing elemen masyarakat.

Kerukunan antarumat beragama dalam Islam dapat diistilahkan sebagai “*tasamuh*” atau toleransi, yang mengarah kepada kerukunan sosial kemasyarakatan. Namun dalam pelaksanaan perihal aqidah dan ibadah, toleransi ini tidak dibenarkan, seperti masalah peunaian sholat, puasa atau haji, tidaklah ada toleransi dan harus tetap bersumber pada aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an dan Hadits.¹⁸

Kerukunan umat beragama dalam Islam dapat dikatakan sebagai konsep persaudaraan universal. Hubungan horizontal antar manusia ini interaksinya dapat berjalan harmonis dan selaras apabila dilandasi oleh keyakinan bahwa seluruh umat manusia sesungguhnya bersaudara, meski ada perbedaan suku, *ras*, bangsa dan agama. Dalam Islam dapat digolongkan sebagai *ukhuwah imaniyah* atau *basyariah* dan *ukhuwah wathaniyah wa an-nasab*.¹⁹

Ukhuwah ubudiyah berarti persaudaraan yang timbul didasari oleh persamaan rasa sebagai sesama manusia secara keseluruhan. Allah

¹⁸ Departemen Agama RI, 1996, “*Kebijakan Departemen Agama dari Masa ke Masa Dalam Kurun Setengah Abad*”, badan Litbang keagamaan, Depag Jakarta, hal. 1

¹⁹Ibid

berfirman dalam *Surat Al-Hujurat ayat 13* yang artinya, “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”²⁰

Ayat tersebut memiliki makna bahwa seluruh manusia merupakan saudara seketurunan. Tersurat bahwa Allah menciptakan manusia ke dalam berbagai ras, bangsa dan suku bukan dengan maksud sengaja menimbulkan perselisihan, melainkan justru agar manusia termotivasi untuk dapat mengatasi perbedaan tersebut dengan menganggapnya sebagai keragaman budaya dan pluralitas global.²¹

Sementara *ukhuwah wathaniyah wa an-nasab* merupakan persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan, dapat juga bersumber dari *Q.S. Al-Hujurat: 13*. Menurut Muhammad Imarah, pluralitas bangsa, suku bangsa, agama, dan golongan merupakan kaidah abadi yang berfungsi sebagai pendorong untuk saling berkompetisi dalam melakukan kebaikan,

²⁰Tarmidzi Taher dan Moch. Basori Soedirman, 1997, “*Hak dan Pluralisme Agama*” Pusat Kajian Strategi dan Kebijakan (PKSK), Surabaya, hal. 12

²¹ Ibid, hal. 14

berlomba menciptakan prestasi dan memberikan tuntunan bagi perjalanan bangsa-bangsa dalam menggapai kemajuan dan keunggulan.²²

Dari penjelasan diatas, nampak agama begitu memegang peranan penting dalam terciptanya iklim kompetisi dalam melakukan kebaikan. Namun sebenarnya, menurut Moeslim Abdurrahman,²³ dalam konteks yang lebih luas, agama tidak hanya menuntut kepatuhan belaka, tetapi juga pergulatan untuk mewujudkan tatanan yang lebih bertanggung jawab. Dalam perspektif sosiologis agama, kita dapat memahami pesan-pesan suci agama yang relevan dengan keadilan sosial, persamaan derajat, demokrasi, egalitarian, dan sebagainya. Dasar semua ini adalah konsep *taqwa*, yang memulangkan seluruh sumber kebenaran dan harkat kemanusiaan di tangan Tuhan, bukan berada dalam otoritas manusia.

Al-Qur'an memberikan beberapa arahan yang penting dalam usaha menjaga kerukunan hidup antarumat beragama, antara lain:²⁴

1) Menghargai dan menghormati perbedaan, serta berkompetisi secara sehat dalam melakukan kebajikan. Seseorang tentunya tidak diperbolehkan memaksakan kepada orang lain untuk berpendirian sama dengannya. Bahkan juga dilarang untuk memaksa seseorang mengikuti agama tertentu seperti yang tersebut dalam *Q.S. Al-Baqarah ayat 256*,

²² Ibid, hal. 18

²³ Moeslim Abdurrahman, *Islam Transformatif*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995, hal. 12-13

²⁴ Prof. Dr. H. Jalaluddin, 2001, "*Psikologi Agama*", Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 12

yakni sebagai berikut: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

- 2) Senantiasa menegakkan kebenaran dan berbuat adil. Allah berfirman dalam *Q.S. Al-Maidah ayat 8*, “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu berbuat tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. Jelaslah bahwa penegakkan kebenaran dan keadilan merupakan syarat utama terwujudnya tatanan masyarakat yang damai dan harmonis. Sejarah membuktikan bahwa persaudaraan yang harmonis tidak akan terwujud tanpa adanya komitmen bersama untuk senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan.
- 3) Memperkecil jurang perbedaan dan memperbesar ruang persamaan. Janganlah mengungkit-ungkit perbedaan yang ada, karena hal itu dapat menimbulkan rasa sakit hati diantara kelompok yang berbeda. Yang

lebih penting, carilah titik persamaan (*kalimatun sawa*) dalam rangka menjadi orang yang terbaik dalam pandangan Allah, yakni orang yang bertakwa.

- 4) Menjalin kerjasama dengan kelompok atau umat lain dalam rangka membangun kemaslahatan dan kesejahteraan bersama. Allah berfirman dalam *Q.S. Al-Maidah ayat 2* yang artinya, “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah maha berat siksa-Nya”.
- 5) Tidak memandang rendah, tidak pula mengejek atau menghina kelompok lain. Al-Qur’an melarang kita mengejek atau mengolok-olok kelompok lain atau memberi gelar yang menyakiti hati seperti tersebut dalam *Q.S. Al-Hujurat ayat 11*, sebagai berikut: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang mengolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu membela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”

b. Prinsip Toleransi sebagai Wujud Kerukunan Umat Beragama.

Dalam percakapan sehari-hari seolah-olah tidak ada perbedaan antara toleransi dengan kerukunan. Antara kedua kata ini, terdapat perbedaan, namun saling membutuhkan. Kerukunan mempertemukan unsur-unsur yang berbeda, sedang toleransi merupakan sikap dari kerukunan. Tanpa kerukunan, toleransi tidak pernah ada, sedangkan toleransi tidak pernah tercermin bila kerukunan belum terwujud.

Secara etimologi, toleransi berasal dari kata *tolerance* (dalam bahasa Inggris) yang berarti sikap membiarkan, mengakui dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan. Di dalam bahasa Arab dikenal dengan *tasamuh*, yang berarti saling mengizinkan, saling memudahkan.²⁵

Dari dua pengertian di atas penulis menyimpulkan toleransi secara etimologi adalah sikap saling mengizinkan dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan. Pada umumnya, toleransi diartikan sebagai pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau kepada sesama warga masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing, selama di dalam menjalankan dan menentukan sikapnya itu tidak bertentangan

²⁵Said Agil Husin Al-Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama*, Penerbit Ciputat Press, Jakarta, hal. 13

dengan syarat-syarat atas terciptanya ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat.²⁶

1) W.J.S Poerwadarminto menyatakan toleransi adalah sikap atau sifat menenggang berupa menghargai serta membolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan maupun yang lainnya yang berbeda dengan pendirian sendiri.²⁷

2) Dewan Ensiklopedia Indonesia

Toleransi dalam aspek sosial, politik, merupakan suatu sikap membiarkan orang untuk mempunyai suatu keyakinan yang berbeda. Selain itu menerima pernyataan ini karena sebagai pengakuan dan menghormati hak asasi manusia.²⁸

Jelas bahwa toleransi terjadi dan berlaku karena terdapat perbedaan prinsip, dan menghormati perbedaan atau prinsip orang lain tanpa mengorbankan prinsip sendiri.²⁹ Dengan kata lain, pelaksanaannya hanya pada aspek-aspek yang detail dan teknis bukan dalam persoalan yang prinsipil.

²⁶Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1979, hal. 22

²⁷W.J.S Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hal. 1084. Lihat juga <http://karya-ilmiah.al.com/skripsi-toleransi-beragama-di-kalangan-komunitas-slankers-semarang-studi-kasus-organisasi-basis-slankers-club-1682>.

²⁸Dewan Ensiklopedia Indonesia, *Ensiklopedia Indonesia Jilid 6*, Ikhtiar Baru Van Hoeve, t.th, hal. 3588

²⁹Said Agil Husin Al-Munawar, MA. *Ibid.*, hal. 13

Di dalam memaknai toleransi ini terdapat dua penafsiran yang berbeda. Pertama, penafsiran negatif yang menyatakan bahwa toleransi itu cukup mensyaratkan adanya sikap membiarkan dan tidak menyakiti orang atau kelompok lain baik yang berbeda maupun yang sama. Sedangkan, yang *kedua* adalah penafsiran positif yaitu menyatakan bahwa toleransi tidak hanyasekedar seperti pertama (penafsiran negatif) tetapi harus adanya bantuan dan dukungan terhadap keberadaan orang lain atau kelompok lain.³⁰

Seperti yang dikemukakan Maskuri Abdullah diatas, Andri menyatakan bahwa bagaimanapun implementasi toleransi bukan hanya kita merasa cukup untuk membiarkan orang lain yang berbeda agama dengan kita untuk beribadah dan tidak menyakitinya, kita pun punya andil untuk membantu dan mendukung keberadaan mereka di tengah kita.³¹

Selain itu toleransi mempunyai unsur-unsur yang harus ditekankan dalam mengekspresikannya terhadap orang lain. Unsur-unsur tersebut adalah:

1) Memberikan Kebebasan atau Kemerdekaan

Setiap manusia diberikan kebebasan untuk berbuat, bergerak maupun berkehendak menurut dirinya sendiri dan juga di dalam memilih suatu agama atau kepercayaan. Kebebasan ini diberikan sejak manusia lahir

³⁰Maskuri Abdullah, *Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keagamaan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2001, hal. 13

³¹ Wawancara dengan Andri pada tanggal 18 September 2017

sampai nanti ia meninggal dan kebebasan atau kemerdekaan yang manusia miliki tidak dapat digantikan atau direbut oleh orang lain dengan cara apapun. Karena kebebasan itu adalah datangnya dari Tuhan YME yang harus dijaga dan dilindungi. Di setiap negara melindungi kebebasan-kebebasan setiap manusia baik dalam Undang-Undang maupun dalam peraturan yang ada. Begitu pula di dalam memilih satu agama atau kepercayaan yang diyakini, manusia berhak dan bebas dalam memilihnya tanpa ada paksaan dari siapapun.³²

2) Mengakui Hak Setiap Orang

Suatu sikap mental yang mengakui hak setiap orang di dalam menentukan sikap perilaku dan nasibnya masing-masing. Tentu saja sikap atau perilaku yang dijalankan itu tidak melanggar hak orang lain, karena kalau demikian, kehidupan di dalam masyarakat akan kacau.

3) Menghormati Keyakinan Orang Lain

Landasan untuk menghormati keyakinan orang lain adalah berdasarkan kepercayaan, bahwa tidak benar ada orang atau golongan yang berkeras memaksakan kehendaknya sendiri kepada orang atau golongan lain. Tidak ada orang atau golongan yang memonopoli kebenaran dan landasan ini disertai catatan bahwa soal keyakinan adalah urusan pribadi masing-masing orang.

³²*Ibid.*, hal. 202

4) Saling Mengerti

Tidak akan terjadi, saling menghormati antara sesama manusia bila mereka tidak ada saling mengerti. Saling anti dan saling membenci, saling berebut pengaruh adalah salah satu akibat dari tidak adanya saling mengerti dan saling menghargai antara satu dengan yang lain.³³

Sedangkan toleransi dalam pergaulan hidup antara umat beragama yang didasarkan pada tiap-tiap agama menjadi tanggung jawab pemeluk agama itu sendiri, mempunyai bentuk ibadah (ritual) dengan sistem dan cara tersendiri yang ditaklifkan (dibebankan) serta menjadi tanggung jawab orang yang memeluknya atas dasar itu. Maka toleransi dalam masalah-masalah keagamaan, melainkan perwujudan sikap keberagaman pemeluk suatu agama dalam pergaulan hidup antara orang yang tidak seagama, dalam masalah-masalah kemasyarakatan atau kemaslahatan umum.³⁴

Toleransi beragama mempunyai arti sikap lapang dada seseorang untuk menghormati dan membiarkan pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah menurut ajaran dan ketentuan agama masing-masing yang diyakini, tanpa ada yang mengganggu atau memaksakan baik dari orang lain maupun dari keluarganya sekalipun.³⁵

³³Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam.* hal. 23

³⁴Said Agil Husin Al-Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama...*hal. 14

³⁵ Wawancara dengan Andri pada tanggal 20 September 2017

Adapun toleransi pada kaum muslimin seperti yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Tidak boleh memaksakan suatu agama pada orang lain.

Di dalam agama Islam orang muslim tidak boleh melakukan pemaksaan pada kaum agama lainnya, karena memaksakan suatu agama bertentangan dengan ajaran agama Islam

- 2) Tidak boleh memusuhi orang-orang selain muslim atau kafir.

Perintah Nabi untuk melindungi orang-orang selain muslim seperti yang dilakukan oleh Nabi waktu berada di Madinah. Kaum Yahudi dan Nasrani yang jumlahnya sedikit dilindungi baik keamanannya maupun dalam beribadah. Kaum muslimin dianjurkan untuk bisa hidup damai dengan masyarakat sesamanya walaupun berbeda keyakinan.

- 3) Hidup rukun dan damai dengan sesama manusia

Hidup rukun antar kaum muslim maupun non muslim seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW akan membawa kehidupan yang damai dan sentosa, selain itu juga dianjurkan untuk bersikap lembut pada sesama manusia baik yang beragama Islam maupun yang beragama Nasrani atau Yahudi.

- 4) Saling tolong menolong dengan sesama manusia

Dengan hidup rukun dan saling tolong menolong sesama manusia akan membuat hidup di dunia yang damai dan tenang. Nabi memerintahkan untuk saling menolong dan membantu dengan sesamanya tanpa memandang suku dan agama yang dipeluknya.³⁶

c. Pentingnya Kerukunan Hidup Beragama.

Sesuatu yang mempersatukan bangsa dan masyarakat Indonesia dalam dimensi hidupnya yang tertinggi dan terdalam adalah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dilengkapi horizontal oleh sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Bila sikap dasar vertikal dan horizontal itu dipahami, dihayati, dan diamalkan secara konsekuen dan konsisten, buahnya ialah persahabatan, persaudaraan, saling menghargai, saling menolong, saling memekarkan. Jadi, sikap-sikap dasar yang berciri inklusif saling merangkul. Kesatuan dan persatuan dalam arti sejati. Meskipun kadang-kadang berselisih, namun selalu ingin rukun kembali.³⁷

Kerukunan hidup beragama bukan sekedar terciptanya keadaan dimana tidak ada pertentangan intern umat beragama, antar golongan-golongan agama dan antarumat-umat beragama dengan pemerintah. Kerukunan hidup beragama merupakan keharmonisan hubungan dalam dinamika pergaulan dan kehidupan bermasyarakat yang saling menguatkan

³⁶Yunus Ali Al-Mukhdor, *Toleransi Kaum Muslimin*, PT. Bungkul Indah, Surabaya, 1994, hal. 5, lihat juga <http://karya-ilmiah.al.com/skripsi-toleransi-beragama-di-kalangan-komunitas-slankers-semarang-studi-kasus-organisasi-basis-slankers-club-1682>

³⁷ Nur Achmad, *Pluralitas Agama Kerukunan dalam Keragaman*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001), hal. 30

dan diikat oleh sikap mengendalikan diri dalam wujud saling menghormati, bekerja sama, dan saling tenggang rasa.

Kerukunan antarumat beragama di Indonesia termasuk salah satu masalah yang mendapat perhatian penting dari pemerintah. Masalah kerukunan hidup antarumat beragama mempunyai kaitan yang besar dengan usaha pembangunan. Dengan adanya kerukunan antarumat beragama akan menjamin dan terpelihara stabilitas sosial untuk keberhasilan serta memperlancar pembangunan. Jika kita tidak dapat menjaga kerukunan antarumat beragama tentu akan berpengaruh pada stabilitas sosial.³⁸

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri atas berbagai suku bangsa, agama dan golongan yang memiliki watak sosial yang berbeda satu dengan yang lainnya. Atas kesadaran dari diri masing-masing untuk hidup berbangsa, bertanah air, dan berbahasa satu, masyarakat Indonesia yang beragam suku, agama, ras, dan antar golongan seharusnya melakukan integrasi nasional untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang ber Bhineka Tunggal Ika.³⁹ Integrasi nasional adalah penyatuan bagian-bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi

³⁸Alamsyah Ratu Perwiranegara, *Pembinaan Kerukunan Hidup Antarumat Beragama* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1982), hal. 46

³⁹Musbir Ibrahim Meuraxa, "Etika Islam Dalam Kebijakan Pembinaan Kerukunan UmatBeragama" vol XI, no.1 (2001) hal. 1

suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi suatu bangsa.⁴⁰

Oleh karena itu masyarakat Indonesia harus memaklumi dengan kemajemukan yang ada. Potensi konflik dalam kemajemukan harus diantisipasi dengan penguatan etika-moral bangsa, dengan mengembangkan semangat kerukunan dan memantapkan tatanan integrasi nasional.⁴¹ Dengan kerukunan, akan terpelihara stabilitas sosial yang akan memperlancar pembangunan.

Di Indonesia kerukunan antarumat beragama sudah terpelihara baik sejak dulu. Karena itu salah satu ahli sejarah Inggris yang bernama Arnold J. Toynbee menamakan Indonesia sebagai “*The land where the Religions are Good Neighbours*” (Negeri dimana agama-agama hidup bertetangga dengan baik) pada tahun 1957, setelah dia mengunjungi Indonesia. Selain itu dia juga mengatakan: “Sungguhpun negeri ini berhadapan dengan berbagai persoalan dan kesulitan dengan masyarakatnya yang serba aneka namun selalu bebas dari salah satu kebatilan umat manusia, yakni sengketa agama, apalagi perang agama seperti di negeri-negeri lain, baik di Timur maupun di Barat. Kalaupun bangsa Indonesia mempergunakan agama

⁴⁰Ibid., hal 2

⁴¹Ibid

dalam peperangan, hal itu adalah perang sabil melawan penjajah, bukan melawan agama lain.”⁴²

Sebenarnya setiap umat beragama khususnya umat Islam pasti memiliki kecintaan pada negaranya. Mereka menginginkan negeri ini tetap menjadi negara yang adil dan makmur, aman, tenteram, dan damai dalam naungan keridhaan ilahi. Dan toleransi adalah sikap hidup umat islam yang sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad agar tetap hidup rukun.

Salah satu usaha pemerintah pada masa lalu adalah merukunkan intern umat beragama, antarumat beragama dan umat beragama dengan pemerintah. Dengan dicanangkannya trilogi kerukunan seperti itu hilanglah sesuatu yang selama ini dapat memisahkan antara orang atau kelompok yang berbeda pendapat.⁴³ Trilogi kerukunan tersebut antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Kerukunan Intern Umat Beragama

Kehidupan intern umat beragama masih seringkali terdapat masalah-masalah yang dapat menimbulkan perpecahan intern umat beragama. Disini diperlukan pembinaan kerukunan intern umat beragama oleh pemuka agama agar pertentangan yang terjadi tidak

⁴²Alamsyah Ratu Perwiranegara, *Pembinaan Kerukunan Hidup Antarumat Beragama* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1982), hal. 47

⁴³Syamsul Bahri, “ *Peranan Agama Dan Adat Dalam Melestarikan Kerukunan Antarumat Beragama,* ” vol XI, no.1 (Januari-Juni 2001), hal. 41

menimbulkan perpecahan antara pengikutnya.⁴⁴Segala persoalan yang terjadi hendaknya diselesaikan dengan kekeluargaan dan sikap saling mementingkan toleransi terhadap sesamanya.

Kerukunan intern umat beragama, lebih khusus umat Islam yang telah tumbuh dan berkembang perlu dilestarikan agar *ukhuwah islamiyah* benar-benar menjadi kenyataan, sehingga perbedaan pemahaman agama tidak lagi menjadi pemisah dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat dan tidak lagi menganggap orang yang tidak sepaham sebagai orang lain atau orang yang diasingkan.⁴⁵

2) Kerukunan Antarumat Beragama

Masalah kehidupan beragama di masyarakat merupakan masalah yang peka. Sebab terjadinya suatu masalah sosial akan menjadi sangat rumit, jika masalah tersebut menyangkut pula masalah agama dan kehidupan beragama. Keputusan Menteri Agama Nomor 70 Tahun 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama merupakan aturan permainan bagi penyiaran dan pengembangan agama di Indonesia demi terciptanya kerukunan hidup antarumat beragama, persatuan bangsa, stabilitas dan ketahanan nasional.⁴⁶

⁴⁴Alamsyah Ratu Perwiranegara, *Pembinaan Kerukunan Hidup Antarumat Beragama*(Jakarta: Departemen Agama RI, 1982), hal. 49

⁴⁵Syamsul Bahri, “ *Peranan Agama Dan Adat Dalam Melestarikan Kerukunan Antarumat Beragama,*” vol XI, no.1 (Januari-Juni 2001), hal. 49

⁴⁶ Ibid,hal. 50

Kemudian agar pelaksanaan pedoman penyiaran agama dapat berjalan tertib ditetapkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1979, tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia.⁴⁷

Dengan keputusan bersama ini maka menjadi tanggung jawab Kementrian Agama maupun Kementrian Dalam Negeri serta pedoman bagi seluruh aparat pemerintahan dalam pelaksanaan tugasnya yang berhubungan dengan masalah keagamaan.

3) Kerukunan Antarumat Beragama dengan Pemerintah

Seiring dengan dinamika kehidupan yang terus berjalan dan semakin berkembang, serta semakin kompleks persoalan kerukunan umat beragama, pemerintah akan terus berupaya mengembangkan kebijakan yang bertujuan akan membangun keharmonisan hubungan di antara sesama umat manusia. Langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Agama, pada awalnya adalah sosialisasi prinsip dasar kerukunan yaitu tidak saling mengganggu antara kelompok-kelompok agama yang berbeda-beda.⁴⁸

Antarumat beragama dan pemerintah seharusnya ditemukan apa yang saling diharapkan keduanya untuk dapat dilaksanakan bersama.

⁴⁷ Ibid.,hal 51

⁴⁸ Muhaimin AG., *Damai di Dunia Damai Untuk Semua Perspektif Berbagai Agama*(Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, Departemen Agama RI, 2004), hal. 1

Pemerintah mengharapkan tiga prioritas nasional yang diharapkan umat beragama dapat berpartisipasi aktif dan positif dalam rangka pembinaan kehidupan beragama yaitu pemantapan ideologi Pancasila, pemantapan stabilitas dan ketahanan nasional serta sukses pembangunan nasional.

2. Konflik Keagamaan

a. Pengertian Konflik Keagamaan

Konflik merupakan serapan dari bahasa Inggris *conflict* yang berarti percekocokan, perselisihan, pertentangan.⁴⁹ *Conflict* sendiri berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul.⁵⁰ *Longman Dictionary of Contemporary English*, mengartikannya sebagai: *A state of disagreement or argument between opposing groups or opposing ideas or principles, war or battle, struggle to be in opposition; disagree.*⁵¹

Konflik dalam definisi ini diartikan sebagai ketidakpahaman atau ketidaksepakatan antara kelompok atau gagasan-gagasan yang berlawanan. Ia juga bisa berarti perang, atau upaya berada dalam pihak yang bersebrangan. Atau dengan kata lain, ketidaksetujuan antara beberapa pihak.

Kalau dikaitkan dengan istilah sosial, maka konflik sosial bisa diartikan sebagai suatu pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat

⁴⁹Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Cet. XVIII; Jakarta: PT. Gramedia, 1990, h. 138

⁵⁰<http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik>, diakses pada tanggal 26 November 2017, 19:02

⁵¹Longman Dictionary of Contemporary English, new edition (Cet. VIII; UK; Longmans Group UK Limited, 1987), h. 212

menyeluruh dalam kehidupan.⁵² Dengan kata lain interkasi atau proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau setidaknya membuatnya tidak berdaya.⁵³

Otomar J. Bartos seperti dikutip Novri Susan, mengartikan konflik sebagai situasi dimana para aktor menggunakan perilaku konflik melawan satu sama lain dalam menyelesaikan tujuan yang berseberangan atau mengekspresikan naluri permusuhan.⁵⁴

Bagi Novri Susan, konflik merupakan pertentangan yang ditandai oleh pergerakan dari beberapa pihak sehingga terjadi persinggungan.⁵⁵ Adapun definisi klasik mengenai konflik adalah seperti dikemukakan Louis Coser, seperti ditulis Ihsan Ali Fauzi dkk, berikut ini: “*a struggle over values and claims to secure status, power, and resources, a struggle in which the main aims of opponents are to neutralize, injure, or eliminate rivals*”.

Berdasarkan definisi ini, Ihsan Ali Fauzi mengartikan konflik keagamaan sebagai, “perseteruan menyangkut nilai, klaim dan identitas yang melibatkan isu-isu keagamaan atau isu-isu yang dibingkai dalam

⁵²<http://etno06.wordpress.com/2010/01/10/agama-dan-konflik-sosial>, diakses pada tanggal 30 November 2017, 18.30

⁵³Ibid.

⁵⁴ Novri Susan, Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer, Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2010, hal. 63.

⁵⁵Ibid., hal. 8

slogan atau ungkapan keagamaan”.⁵⁶ Pertentangan atau perselisihan sendiri bisa mengambil bentuk perselisihan atau pertentangan ide maupun fisik. Berikut ini beberapa definisi konflik dari beberapa ahli.⁵⁷ Taquiri dalam Newstorm dan Davis, memandang konflik sebagai warisan kehidupan sosial sebagai akibat adanya ketidaksetujuan, kontroversi atau pertentangan antara dua atau lebih pihak yang berlangsung terus menerus.

Stewart mengatakan bahwa konflik senantiasa berpusat pada beberapa penyebab utama, yakni tujuan yang ingin dicapai, alokasi sumber-sumber yang dibagikan, keputusan yang diambil, maupun perilaku setiap pihak yang terlibat.⁵⁸ Sedangkan Devito menyatakan bahwa interaksi yang disebut komunikasi antara individu yang satu dengan yang lainnya, tak dapat disangkal akan menimbulkan konflik dalam level yang berbeda-beda.⁵⁹

b. Faktor Faktor Penyebab Konflik

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa steril dari interaksi, baik sosial, politik, budaya, agama dan lain-lain. Perbedaan ciri-ciri bawaan individu dalam suatu interaksi seperti ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya menjadikan konflik sebagai

⁵⁶ Ihsan Ali Fauzi dkk., *Pola-pola Konflik Keagamaan di Indonesia (1990-2008)*, Jakarta: Hasil Penelitian, 2009, hal. 7

⁵⁷<http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik>, diakses pada tanggal 26 September 2017, 19:02

⁵⁸ Stewart, Edward C. *American Cultural Patterns: A Cross-Cultural Perspective* Cet. XIII; America: Intercultural Press, 1993. hal. 341

⁵⁹ Joseph A. Devito. *The Interpersonal Communication Book*. Edisi 7. America: Harper Collins College Publisher, 1995. hal.381

situasi wajar dalam setiap masyarakat. Dengan kata lain, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Dalam ranah interaksi tersebut, konflik kepentingan dan penegasan identitas akan muncul dalam skala berbeda seperti dikemukakan Novri dengan konflik antar-orang (*interpersonal conflict*), konflik antar-kelompok (*intergroup conflict*), konflik antar kelompok dengan negara (*vertical conflict*), dan konflik antar negara (*interstate conflict*).⁶⁰

Konflik, terutama yang mengambil bentuk kekerasan telah menjadi kajian banyak psikolog terutama dalam kaitannya dengan aspek-aspek internal manusia. Sigmund Freud misalnya memandang konflik atau kekerasan sebagai wujud frustrasi dari suatu dorongan yang bersifat dasar.⁶¹ Sejarah membuktikan manusia telah menjadi pemangsa manusia lainnya.

Pada dimensi lain Carl Jung melihat pada adanya ketidaksadaran kolektif dan adanya pola dasar perilaku (*archetype*). Baginya, konflik yang mengambil bentuk kekerasan merupakan proyeksi dari bagian-bagian gelap yang ditekan ke dalam bagian tidak sadar, yang kalau direpresi akan sangat berbahaya, bersifat jahat kemudian diproyeksikan pada orang lain.⁶²

George Simmel, salah seorang bapak sosiologi konflik, seperti dicatat Turner, melihat sosiologi pada tiga perspektif yaitu relasionisme, sosiologi

⁶⁰NovriSusan, *Pengantar Sosiologi Konflik...*, hal. 9

⁶¹Friedman, "The Power of Violence and the Power of Non-Violence," dalam Muchtar Lubis (Penyunting), *Menggapai Dunia Damai*, diterjemahkan S. Maiman (Cet. I; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988), hal. 45

⁶²Ibid., hal. 46

dan bentuk-bentuk sosial. Relasionisme memandang bahwa unsur-unsur sosial hanya bisa dipahami dalam kaitannya dengan totalitas dan bukan dalam isolasi. Sementara bentuk-bentuk sosial merujuk pada keberadaan lembaga sosial seperti keluarga, bentuk pertukaran sosial, jaringan dan lain-lain. Adapun sosiasi merupakan proses yang menghubungkan bagian-bagian menjadi suatu system, yang menghubungkan antar-individu menjadi masyarakat.⁶³

Fenomena konflik dengan demikian merupakan proses sosiasi. Ia bisa menciptakan asosiasi yaitu kumpulan individu yang membentuk masyarakat. Tetapi ia juga bisa melahirkan disosiasi, yaitu interaksi konfrontatif antara individu yang bisa lahir dari *feeling of hostility* berupa kebencian, kecemburuan, keinginan dan nafsu yang ada secara alamiyah.⁶⁴

Dewasa ini, di dunia ketiga, seperti ditulis Uno Steinbach, konflik bisa disebabkan oleh adanya perpecahan bangsa, perkembangan yang timpang, bentrokan kultural serta gerakan-gerakan pembebasan.⁶⁵ Ketegangan-ketegangan pada level kebudayaan misalnya, sangat terkait dengan pembangunan. Kebudayaan dan agama merupakan faktor-faktor unik mengingat keduanya merupakan unsur penggerak (*mobilizing elementas*).

⁶³Ibid., hal. 46

⁶⁴Ibid., hal. 47

⁶⁵Steinbach, "Sumber Konflik Dunia Ketiga," dalam Christoph Bertram, *The Third World Conflict & Internationality Security*, ed., diterjemahkan Hasymi Ali dengan judul *Konflik Dunia Ketiga dan Keamanan Dunia* (Cet. I; Jakarta: Bina Aksara, 1988), hal. 49

Meskipun demikian, dalam pandangan Sean Macbride, konflik yang terjadi lebih banyak disebabkan oleh ketidakadilan, sehingga mestinya para penguasa, pemuka agama, pemimpin politik menyadari bahwa prasyarat kedamaian yaitu keadilan. Dengan kata lain, struktur yang merampas hak-hak dan martabat manusia akan menghambat terciptanya keadilan.⁶⁶

Dalam kaitan dengan agama, George Ritzer memandang bahwa terjadinya perubahan sosial, yang tentunya diikuti oleh ragam konflik, sebagai akibat adanya revolusi politik, revolusi industri atau bahkan urbanisasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap pola keberagamaan. Relevansi yang kuat ini melahirkan banyak sosiolog dan karyanya dengan basis agama yang kuat dan sekaligus memperkenalkan sosiolog. Sebutlah misalnya Durkheim, Weber serta Marx.⁶⁷

Dahrendorf seperti ditulis Novri, memandang bahwa masyarakat tidak selalu terintegrasi, harmonis, atau saling memenuhi. Sebaliknya, terdapat wajah lain berupa konflik, disintegrasi, serta perubahan.⁶⁸ Wajah lain masyarakat berupa konflik, disintegrasi atau perubahan dimungkinkan oleh

⁶⁶Macbride, "Peace: The Desperate Imperative of Humanity," dalam Mochtar Lubis (Penyunting), *Menggapai Dunia Damai*, diterjemahkan S. Mainman dkk (Cet. I; Jakarta: Yayasan Obor, 1988), hal. 29

⁶⁷Ritzer, *Modern Sociological Theory* 4th ed (Singapore: The McGraw-Hill Companies Inc, 1988), hal. 8

⁶⁸NovriSusan, *Pengantar Sosiologi Konflik...*, hal. 55

adanya konflik kepentingan yang merupakan kenyataan sosial tak berakhir.

Bagi Ali Syari'ati, seperti dikutip Noryamin Aini, sejarah dialektis kehidupan manusia ini pada prinsipnya dimulai dan beranjak dari dua dimensi kontradiktif esensi penciptaan Adam yaitu tanah liat (*clay*) dan ruh (*spirit*) Pertentangan internal antara ilahiyah dan kekotoran unsur tanah secara fenomenal juga dapat dilihat pada realitas sosial, politik, ekonomi, budaya atau agama. Pertentangan ini bisa dicermati pada fenomena Hābil dan Qābil, putra Ādam. Sehingga Syari'ati akhirnya berkesimpulan perbedaan karakter keduanya bukan karena sebab eksternal berupa pengaruh lingkungan atau ajaran agama.⁶⁹ Baginya, Qābil dan Hābil lebih sebagai sosok simbolik yang menggambarkan corak ideologi dan faham kolektif (Qābilisme dan Hābilisme). Artinya faham ini akan tetap ada dalam sejarah kemanusiaan manusia dalam bentuk yang variatif sebagai wujud dialektika abadi pada diri manusia, meskipun keduanya telah lama meninggal.⁷⁰

Simmel, seperti dikutip Novri, menyebut sumber konflik sebagai *hostile feeling* (keagresifan atau permusuhan) yang ada secara laten dalam diri manusia. Namun demikian, bagi Coser, *hostile feeling* belum tentu

⁶⁹Aini, "Dialektika Cerita Qābil dan Hābil: Pergeseran Dari Kisah Al-Qur'an Ke Sosiologi Agama," dalam M. Deden Ridwan, ed. *Melawan Hegemoni Barat: Ali Syari'ati dalam Sorotan Cendekiawan Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Lentera, 1999), hal. 178

⁷⁰Ibid., hal. 182

menyebabkan konflik secara terbuka (*covert conflict*). Konflik terbuka bisa terjadi selain memang karena adanya *hostile feeling*, juga adanya perilaku permusuhan (*hostile behavior*)⁷¹ dalam masyarakat. Lebih lanjut Coser dua tipe dasar konflik yaitu konflik realistik dan non-realistik. Konflik realistik bersumber dari hal-hal kongkrit, lebih bersifat material, seperti perebutan sumber-sumber ekonomi atau wilayah. Biasanya kalau sudah diperoleh tanpa perselisihan, biasanya konflik bisa diselesaikan dengan damai. Adapun konflik non-realistik didorong oleh keinginan yang tidak rasional, cenderung bersifat ideologis, seperti konflik antar agama, antar etnis, antar kepercayaan dan lain-lain. Konflik jenis ini merupakan salah satu cara menurunkan ketegangan, mempertegas identitas kelompok. Namun demikian, sangat sulit menemukan resolusi konflik, konsensus serta perdamaian.⁷²

Secara umum konflik bisa muncul dari misalnya model interaksi sosial yang ada, nilai-nilai berupa identitas atau agama, maupun dominasi struktural. Dalam kaitan dengan nilai identitas dan agama sebagai salah satu sumber konflik, Issacs sebagaimana dikutip Novri, dengan menggunakan pendekatan konflik komunal pada dimensi konflik primordial memandang konflik sebagai akibat pergeseran kepentingan kelompok identitas yang berbasis etnis atau keagamaan. Teori ini

⁷¹NovriSusan, *Pengantar Sosiologi Konflik...*, hal. 63-64

⁷² *Ibid.*, hal. 60-61

memandang bahwa konflik terjadi karena bertemunya berbagai budaya, etnis, ras, geografis.⁷³

Al-Qur'an juga banyak menyinggung tentang potensi-potensi ketidakbaikan dalam diri manusia. Sebutlah misalnya Q.S. Yūsuf/12: 5. Ayat ini menginformasikan bahwa di dalam diri manusia terdapat kekuatan-kekuatan yang selalu berusaha menarik dirinya untuk menyimpang dari nilai-nilai dan norma ilahi. Potensi destruktif dalam diri bisa mendominasi kalau tidak dinetralisir oleh pengembangan potensi kebaikan dan lingkungan. Dengan kata lain, konflik secara laten ada dalam diri manusia. Potensi konflik ini bisa teraktualisasi kalau keliru memahami ajaran agama. Dan bisa juga dipercepat oleh lingkungan baik ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain.

Mencermati hal ini, konflik sosial dalam masyarakat menjadi keniscayaan yang bisa disebabkan karena beberapa faktor seperti:⁷⁴*Pertama*, perbedaan pendirian atau perasaan individu. Sebagai contoh kecil, kita yang ada di ruang ini sekarang ini, tentu mempunyai perasaan yang tidak sama dalam kaitannya dengan situasi ruangan. Ada yang menginginkan AC dengan kadar suhu tertentu, tetapi mungkin yang lain tidak karena tidak terbiasa dengan kondisi suhu tertentu. Perbedaan perasaan ini bisa menyulut konflik kalau tidak dinegosiasikan dengan baik.

⁷³ Ibid., hal. 92

⁷⁴<http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik>, diakses 26 November 2017, 19:02

Dalam perspektif lebih luas, seiring dengan perubahan sebagai akibat globalisasi, perasaan dan bahkan pendirian individu, kelompok atau bangsa bisa berubah dan berbeda dalam memberikan respon terhadap setiap perubahan yang ada. Rupanya, pengakuan Donald Michael seperti dikutip Ziauddin Zardar bahwa pengendalian kehidupan dunia bisa dilakukan dengan semakin banyaknya informasi dan pengetahuan terbantahkan menunjukkan kebenaran. Faktanya semakin banyak informasi semakin disadari segala sesuatu tidak dapat dikendalikan.⁷⁵ Globalisasi komunikasi informasi memberi pengaruh luar biasa kepada cara pandang, perasaan bahkan keputusan-keputusan seseorang.

Kedua, Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Perbedaan nilai-nilai kebudayaan juga berpotensi menimbulkan konflik. Sebagai contoh misalnya bisa dilihat salah satu nilai budaya Amerika yang *to the point*, sementara tradisi Jepang sedikit berbeda.⁷⁶ Atau antara konsep *tabe'* Bugis-Makassar dengan budaya kebanyakan orang Eropa yang kelihatannya tidak terlalu memperhatikan pola interaksi model tersebut.

Perbedaan kebudayaan dan nilai-nilai kehidupan semakin kelihatan ketika interaksi masyarakat dunia semakin mudah. Anthony Giddens

⁷⁵Sardar, *Information and the Muslim World: A Strategy for the Twenty-first Century*, diterjemahkan Priyono dan Ilyas Hasan dengan judul *Tantangan Dunia Islam Abad 21: Menjangkau Informasi* Cet. I; Bandung: Mizan, 1988, hal. 15

⁷⁶Stewart, *American Cultural Patterns: A Cross-Cultural Perspective*, Cet. XIII; America: Intercultural Press, 1985, h. 49

(1994) seperti dikutip Novri, menyebut globalisasi dewasa ini sebagai transformasi ruang dan waktu. Globalisasi terjadi secara massif yang mendorong perubahan tata sosial budaya dan politik di seluruh Negara.⁷⁷ Kekeliruan menempatkan diri dalam pergaulan dunia yang semakin terbuka berpotensi menimbulkan gesekan bahkan konflik. *Ketiga*, Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok, baik menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya atau agama, juga berpotensi konflik. *Keempat*, perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat.

Secara lebih spesifik, konflik sosial berbau agama di Indonesia disebabkan oleh misalnya:⁷⁸*Pertama*, adanya klaim kebenaran. Pluralitas manusia menyebabkan kebenaran diinterpretasi secara berbeda dan dipahami secara absolut. Pemahaman seperti itu akan berpotensi konflik manakala dijadikan landasan gerak dalam dakwah. Absolutisme, eksklusivisme, fanatisme, ekstremisme dan agresivisme adalah penyakit-penyakit yang biasanya menghinggapi aktivis gerakan keagamaan. Absolutisme adalah kesombongan intelektual, eksklusivisme adalah kesombongan sosial, fanatisme adalah kesombongan emosional, ekstremisme adalah berlebih-lebihan dalam bersikap dan agresivisme adalah berlebih-lebihan dalam melakukan tindakan fisik.

⁷⁷ Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik...*, hal. 234

⁷⁸<http://etno06.wordpress.com/2010/01/10/agama-dan-konflik-sosial/> diakses pada tanggal 29 Oktober 2017, pukul 14.30

Dalam ajaran atau doktrin agama, terdapat seruan untuk menuju keselamatan yang dibarengi dengan kewajiban mengajak orang lain menuju keselamatan tersebut. Ini akan memunculkan sentimen agama, sehingga benturan pun sulit dihindari. Fenomena yang seperti inilah yang dapat melahirkan konflik antar agama. Misalnya, peristiwa Perang Salib antara umat Islam dan umat Kristen. Tragedi ini sangat kuat muatan agamanya, dari pada politisnya. *Kedua*, wilayah agama dan suku semakin kabur. Kasus ini bisa dilihat pada mantan Menteri Masa Habibi, AM. Saefuddin, ketika “menuduh” Megawati pindah agama, hanya dengan melihat kehadiran Megawati dalam suatu tradisi keagamaan suku tertentu. *Ketiga*, doktrin jihad yang dipahami secara sempit. *Keempat*, kurangnya sikap toleransi dalam beragama. *Kelima*, minimnya pemahaman terhadap ideologi pluralisme.

Secara generik Islam berarti ketundukan,⁷⁹ berserah diri,⁸⁰ suci atau bersih,⁸¹ perdamaian,⁸² selamat.⁸³ Itu secara dogmatis. Namun demikian nilai-nilai dogmatis tersebut tidak mudah dibumikan. Fakta historis memperlihatkan sisi lain. Dogma ideal langit tidak bisa dengan serta merta diwujudkan. Ia memerlukan kesungguhan, kesadaran, keinginan dan tanpa radikalisme, ekstrimisme, kekerasan.

⁷⁹ Q.S Al-Nisā/4:125

⁸⁰ Q.S Ali ‘Imran/3: 83

⁸¹ Q.S Al-Syu’arā/26: 89

⁸² Q.S Muhammad/47: 35

⁸³ Q.S Al- An’ām/6:54

Kemunculan gerakan-gerakan dengan mengambil konflik kekerasan memang ada dalam tradisi Islam. Bagi Azyumardi Azra, penyebabnya kompleks, terkait satu sama lain, seperti doktrinal, politis, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Namun demikian, lebih disebabkan oleh keragaman respon terhadap Barat dan Eropa. Respon melihat barat mendorong upaya pembaharuan dengan modernisme dan reformisme. Respon lain, kelompok ekstrem, radikal, Barat penyebab kemunduran muslim. Tidak hanya menjajah tetapi merusak tatanan sistem budaya, sosial, ekonomi, intelektual, merusak institusi pendidikan Islam. Padahal sejatinya banyak institusi yang diperkenalkan Barat lemah, tidak kokoh.⁸⁴

Kalangan radikal hadapi tiga musuh sekaligus: barat sebagai *root of evils*, rezim penguasa negeri muslim yang sekuler, dengan *mainstream* muslim yang menolak ekstrimisme dan radikalisme dalam politik dan literalis dalam doktrin islam.⁸⁵ Secara psikologis kalangan ini tertekan karena menghadapi banyak musuh. Mereka menggunakan doktrin jihad sebagai justifikasi gerakan. Gejalanya banyak, IAIN yang dianggap salah satu bagian dari *mainstream* Islam Indonesia dipandang penyebar kemurtadan, liberalisme, konteksualisme dan lain-lain.

c. Isu-Isu dalam Konflik Keagamaan

⁸⁴Thaha, *Konteks Berteologi di Indonesia Pengalaman Islam*, Cet. I, Jakarta: Paramadina, 1999, hal. 91.

⁸⁵*Ibid.*, hal. 95

Berdasarkan kajian Ihsan Ali-Fauzi dkk,⁸⁶ isu-isu keagamaan yang menyebabkan konflik keagamaan dengan Indonesia sebagai contoh kasus, dalam kurun waktu 1990-2008, terdiri dari 6 kategori. *Pertama, isu moral*, seperti isu-isu perjudian, minuman keras (miras), narkoba, perbuatan asusila, prostitusi, pornografi/pornoaksi. Isu-isu moral lainnya seperti antikorupsi juga dimasukkan ke dalam isu keagamaan selama isu tersebut melibatkan kelompok keagamaan dan/atau dibingkai oleh para aktor yang terlibat dalam slogan atau ekspresi keagamaan.

Kedua, isu sektarian, yaitu isu-isu yang melibatkan perseteruan terkait interpretasi atau pemahaman ajaran dalam suatu komunitas agama maupun status kepemimpinan dalam suatu kelompok keagamaan. Dalam Islam, kelompok Ahmadiyah, Lia-Eden dan Al Qiyadah Al Islamiyah adalah di antara kelompok-kelompok keagamaan yang kerap memicu berbagai insiden protes maupun kekerasan, baik yang dilakukan oleh kelompok keagamaan maupun warga masyarakat secara umum. Sedangkan dalam komunitas Kristen, konflik kepemimpinan gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) menjadi contoh yang mewakili isu sektarian ini.

Ketiga, isu komunal, yaitu isu-isu yang melibatkan perseteruan antarkomunitas agama, seperti konflik Muslim-Kristen, maupun perseteruan antara kelompok agama dengan kelompok masyarakat lainnya yang tidak selalu bisa diidentifikasi berasal dari kelompok agama tertentu.

⁸⁶ Ihsan Ali Fauzi dkk., *Pola-pola Konflik Keagamaan...* hal. 9-10

Isu seperti penodaan agama, seperti dalam kasus karikatur tentang Nabi Muhammad, dimasukkan dalam kategori isu komunal ini. Perlu ditegaskan: Perseteruan atau bentrok menyangkut suatu isu keagamaan – sepanjang kedua belah pihak yang terlibat tidak dapat diidentifikasi berasal atau mewakili komunitas keagamaan yang sama juga dimasukkan dalam isu ini. Jika kedua belah pihak pelaku dapat diidentifikasi berasal dari komunitas agama yang sama, maka konflik semacam itu akan dimasukkan dalam kategori isu sektarian.

Keempat, isu terorisme, yaitu isu yang terkait dengan aksi-aksi serangan terordengan sasaran kelompok keagamaan atau hak milik kelompok keagamaan tertentu, maupun serangan teror yang ditujukan terhadap warga asing maupun hak milik pemerintah asing. Tindakan kekerasan ini kerap disebut juga sebagai tindak terorisme keagamaan (*religious terrorism*), yang oleh Juergensmeyer dipandang sebagai “tindakan simbolik” atau *performance violence*, ketimbang suatu tindakan taktis atau strategis. Untuk kasus Indonesia, contohnya adalah pengeboman di Bali yang dilakukan oleh kelompok Imam Samudra, dan berbagai serangan bom di Jakarta. Adapun kekerasan berupa serangan teror di wilayah konflik komunal, maupun insiden yang terkait dengan upaya penyelesaian konflik di wilayah komunal tertentu seperti Poso, Sulawesi Tengah, dan Ambon, Maluku, dimasukkan dalam kategori ketiga di atas, yaitu isu komunal.

Kelima, isu politik-keagamaan, yaitu isu-isu yang melibatkan sikap anti terhadap kebijakan pemerintah Barat atau pemerintah asing lainnya dan sikap kontra ideologi/kebudayaan Barat atau asing lainnya. Termasuk ke dalam isu politik-keagamaan di sini adalah isu penerapan syariah Islam atau Islamisme, serta pro-kontra menyangkut kebijakan pemerintah Indonesia yang berdampak pada komunitas keagamaan tertentu.

Terakhir, *keenam, isu lainnya*, meliputi isu subkultur keagamaan mistis seperti santet, tenung dan sebagainya, maupun isu-isu lainnya yang tidak termasuk dalam 5 (lima) kategori sebelumnya.

Data-data di atas memperlihatkan bahwa isu konflik keagamaan sangat variatif dan beragam. Bisa juga dilihat konflik keagamaan berwujud aksi damai dan aksi kekerasan. Yang pertama merupakan tindakan tanpa kekerasan dalam merespon isu keagamaan yang sementara diperselisihkan. Termasuk di dalamnya aksi protes, aksi dukungan maupun aksi mediasi. Yang kedua, tindakan atau aksi kekerasan fisik dalam merespon isu keagamaan yang diperselisihkan dan berakibat mati, luka, hilang, mengungsi pada orang, atau kerugian, kerusakan atau kehilangan harta benda.

3. Dialog Keagamaan

a. Pengertian Dialog

Dalam forum-forum keberagaman di Indonesia, kerap kali istilah dialog antar-agama (*inter-religious dialogue*) menjadi hal yang

sudah dianggap dimengerti begitu saja oleh para pelakunya. Padahal, bisa jadi apa yang dimaksud masing-masing orang akan istilah tersebut belum mengarah ke hal yang senada.

Beberapa forum terkadang menyukai istilah dialog lintas agama karena menekankan keaktifan tiap orang yang terlibat untuk ‘melintas’ dalam pengertian berkunjung, aktif bergerak ke umat yang berbeda, tidak terpaku dan tertutup di kotak religiusnya.

Sementara yang lain lebih menyukai penggunaan istilah dialog lintas iman atau dialog antar iman (*interfaith dialogue*). Selain karena defenisi agama kadang terlalu kaku yaitu hanya merujuk ke enam agama yang difasilitasi pemerintah Indonesia. Kata ‘iman’ juga menekankan kalau dialog ini lebih bersifat penghayatan. Pelaku dialognya bukan sekedar membicarakan agama secara konseptual, tapi menghayati hal yang didialogkan sebagai keyakinan imannya.

Ada lagi yang menekankan agar istilah yang dipakai adalah dialog antar umat beragama (*interreligious-people dialogue*). Sebab, menurut mereka, dialog ini jangan sekedar dimonopoli oleh elit rohaniwan, tapi juga harus dilakoni tiap umat beragama dalam kesehariannya.

Di dunia internasional sekalipun, memang tidak ada defenisi tunggal terhadap istilah ini. Karena memang tidak ada pendekatan yang tunggal atasnya. Namun untuk defenisi yang memadai, tiga ide terkini dari beberapa empat pemikir progresif berikut dapat dipertimbangkan.

Leonard Swidler, akademisi yang paling terkenal dalam bidang dialog antar agama mendefinisikan dialog antar agama sebagai: suatu pembicaraan antar individu dan lewat itu juga melibatkan dua atau lebih komunitas atau kelompok agama dengan pandangan yang berbeda-beda. Tujuan utama dari perjumpaan ini adalah setiap peserta belajar dari pihak lain sehingga ia dapat berubah dan bertumbuh, lantas perspektif kelompok atau komunitasnya juga mengalami hal serupa.⁸⁷

Menurut Hendropuspito dalam Adon Nasrullah,⁸⁸ kata dialog berasal dari kata Yunani “*dia-logos*” artinya bicara dua pihak, atau “dwiwicara”. Lawannya adalah “monolog” yang berarti “bicara sendiri”. Dialog ialah percakapan antara dua orang (atau lebih) dalam mana diadakan pertukaran nilai yang dimiliki masing-masing pihak. Jadi, dialog antarumat beragama adalah temu wicara antara dua atau lebih pemeluk agama yang berbeda, yang didalamnya diadakan pertukaran nilai dan informasi keagamaan pihak masing-masing untuk mencapai bentuk kerjasama dalam semangat kerukunan.

Dalam kasus dialog antara Islam dan Kristen, menurut Hassan Hanafi⁸⁹ keduanya mempunyai dua “karakteristik ideal” (*ideal types*) yang kaya untuk dikomparasikan dan selanjutnya bisa mengantarkan kepada

⁸⁷Leonard Swidler, *Toward a Universal Theology of Religion* (Maryknoll, NY: Orbis Books: 1987) hal. 6

⁸⁸ Adon Nasrullah Jamaludin, *Agama & Konflik Sosial*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015, hal. 116

⁸⁹Hassan Hanafi, *Religious Dialogue & Revolution, Essay on Judaism, Christianity & Islam* (Cairo: The Anglo Egyptian Bookshop, 1977) hal. 43

suatu *common platform*. Dialog perlu dilakukan dengan mengedepankan prinsip humanisme, karena antara Islam dan Kristen mempunyai pandangan yang kosmopolit mengenai manusia yang lebih memudahkan untuk melakukan komparasi antara dua dimensi: antropologis dan teologis. Tuhan dan manusia, menurut Hanafi, merupakan kata kunci bagi timbulnya persatuan dan perpecahan antara kultur modernitas dan kultur tradisional atau antara Kristen dan Muslim di Timur.

Ada beberapa alasan keraguan sementara orang-orang muslim menanggapi dialog agama ini. Gerakan dialog ini adalah murni inisiatif Kristen Barat dan orang-orang Islam merasa diri mereka sebagai tamu yang diundang, tidak memiliki agenda dan merasa hasil yang bisa dicapai dari dialog ini sedikit. Keyakinan mereka bahwa misi Kristen merupakan agenda tambahan atas kolonialisme yang sering dilakukan orang-orang Kristen menambah ketidakpercayaan terhadap agenda Kristen dan dialog tersebut ditakutkan oleh orang-orang muslim sebagai agenda tersembunyi dari agenda *evangelism*. Ketidakpercayaan ini ditambah dengan ketidakadilan global Barat, khususnya dalam konflik Israel-Palestina. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam dialog ini menurut Hans Kung⁹⁰ adalah, bahwa setiap orang beragama harus membuktikan keimanannya masing-masing. Terlepas dari semua perbedaan yang ada

⁹⁰Hans Kung, "Sebuah Model Dialog Kristen-Islam" dalam Jurnal *Paramadina* (Jakarta, Paramadina Juli-Desember, 1998), hal. 32

menurut Kung, orang Kristen dan Islam harus bertanggung jawab terhadap Tuhan dan melayani masyarakat manusia dengan penuh penghormatan satu sama lain.

Seyyed Hossein Nasr⁹¹ menawarkan kajian agama dengan *philosophia perennis*, karena dia melihat bahwa banyaknya kajian keagamaan di Barat kurang memahami bahwa realitas agama sebagai agama dan bentuk-bentuk yang sakral sebagai realitas ilahi. Sesuatu yang hilang di Barat dalam kajian agama adalah suatu pengetahuan yang bisa memandang agama secara adil, yaitu dengan menggunakan *perennial wisdom* yang berada dalam “hati” semua tradisi-tradisi keagamaan. *Philosophia perennis* merupakan pengetahuan yang berada pada dalam “hati” agama yang bisa menerangkan makna ritus-ritus keagamaan, doktrin-doktrin dan simbol-simbol. *Philosophia perennis* juga menyediakan kunci untuk memahami pentingnya pluralitas agama dan metode untuk masuk kepada dunia agama lain tanpa mereduksi signifikansi atau menghilangkan komitmen kita kepada dunia agama yang menjadi kajian kita. *philosophia perennis* akan mengkaji agama dari segala aspeknya; Tuhan dan manusia, wahyu dan seni yang sakral, simbol-simbol dan *images*, ritus-ritus dan hukum-hukum agama, mistisisme dan etika sosial, metafisika, kosmologi dan teologi.

⁹¹ Hossein Nasr, *The Need of Sacred Science* (United Kingdom: Curzon Press, 1993) hal.113

b. Model-Model Dialog

Menurut Azyumardi Azra,⁹² ada beberapa model dialog antarumat beragama (tripologi), yaitu:

Pertama, dialog parlementer (*parliamentary dialogue*), yakni dialog yang melibatkan ratusan peserta, seperti dialog *World's Parliament of Religions* pada tahun 1873 di Chicago, dan dialog-dialog yang pernah diselenggarakan oleh *World Conference on Religion and Peace* (WCRP) pada dekade 1980-an dan 1990-an.

Kedua, dialog kelembagaan (*Institutional Dialogue*), yakni dialog diantara wakil-wakil institusional berbagai organisasi agama. Dialog kelembagaan ini sering dilakukan untuk membicarakan masalah-masalah mendesak yang dihadapi umat beragama yang berbeda. Dialog seperti ini biasanya melibatkan majelis-majelis agama yang diakui pemerintah seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Darmadan Perwalian Umat Budha Indonesia(WALUBI).

Ketiga, dialog teologi (*theological dialogue*). Dialog ini mencakup pertemuan-pertemuan reguler maupun tidak, untuk membahas persoalan-persoalan teologis dan filosofis. Dialog teologi pada umumnya diselenggarakan kalangan intelektual atau organisasi-organisasi yang

⁹²Azyumardi Azra, *Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam* (Jakarta: Paramadina, 1999), hal. 63-64.

dibentuk untuk mengembangkan dialog antaragama, seperti interfidei, paramadina, LKiS, LP3M, MADIA, dan lain-lain.

Keempat, dialog dalam masyarakat (*dialogue in community*), dialog kehidupan (*dialogue of live*), dialog seperti ini pada umumnya berkonsentrasi pada penyelesaian “hal-hal praktis dan aktual” dalam kehidupan yang menjadi perhatian bersama dan berbangsa dan bernegara. Dialog dalam kategori ini biasanya diselenggarakan kelompok-kelompok kajian dan LSM atau NGO.

Kelima, dialog kerohanian (*spritual dialogue*), yaitu dialog yang bertujuan untuk menyuburkan dan memperdalam kehidupan spritual di antara berbagai agama.

Pada pihak Kristen, menurut Kate Zebiri⁹³ sikap keterbukaan terhadap agama lain telah melahirkan gerakan antar iman yang pada dekade terakhir terekspresikan dalam dialog yang terorganisir. Vatikan telah mendirikan sekretariat bagi agama non-Kristen (*Pasific Council for Interreligious Dialogue-PCID*) pada tahun 1964 yang mempunyai misi mempromosikan kajian tradisi-tradisi agama lain dan mensponsori dialog antar iman (*interfaith dialogue*). Vatikan II (1962-5) juga telah mengeluarkan dokumen yang berisi tentang penghormatannya terhadap orang-orang muslim, karena mereka menyembah Satu Tuhan Yang Maha Hidup, Abadi, Pengasih dan Perkasa. Mereka juga tunduk sepenuh hatinya kepada

⁹³Kate Zebiri, *Muslims and Christians, Face to Face* (Oxford: Oneworld, 1997), hal. 34-36.

takdir Tuhan, sebagaimana yang dilakukan Ibrahim yang merupakan sandaran keimanan Islam. Walaupun mereka tidak mengakui bahwa Yesus sebagai Tuhan tetapi mereka mengakuinya sebagai Nabi. Mereka juga menghormati Maryam, Ibu Yesus yang suci. Mereka juga menantikan hari perhitungan.

Praktis dialog agama yang sebenarnya seperti diungkap oleh Ahmad Gaus⁹⁴ adalah, dialog yang meleburkan diri pada realitas dan tatanan sosial yang tidak adil dengan sikap kritis. Karena setiap agama memiliki nilai-nilai kebaikan dan misi penegakan moralitas.

Dengan tegas dikatakan oleh Mudji Sutrisno⁹⁵, bahwa tidak cukup membangun dialog antaragama hanya dengan dialog-dialog logika rasional, namun perlu pula logika psikis. Maka ikhtiar dialog teologi kerukunan juga harus dibarengi dengan pencairan-pencairan psikologis, seperti rasa saling curiga yang selama ini selalu muncul. Memang, seperti juga yang diungkap oleh Kautsar Azhari,⁹⁶ bahwa kendala dialog antar umat beragama adalah persoalan eksklusivisme. Seorang eksklusivis akan terus berusaha agar orang lain mengikuti agamanya dengan menganggap agama orang lain keliru dan tidak selamat (*truth claim*).

⁹⁴Andito (ed.), *Atas Nama Agama: Wacana Agama dalam Dialog "Bebas" Konflik*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), 161-162

⁹⁵Ibid., hal. 335

⁹⁶ Ibid

Dengan demikian, sepanjang sikap di atas belum tercairkan, maka dialog menuju cita-cita agama yang luhur sulit dicapai. Maka jangan khawatir dengan dialog, karena yang ingin dicapai dalam dialog, kata Victor I. Tanja⁹⁷ bukan soal kompromi akidah, melainkan bagaimana akhlak keagamaan kita dapat disumbangkan kepada orang lain. Dan seperti yang di tegaskan Shihab,⁹⁸ bahwa kita tidak ingin mengatasnamakan ajaran agama, dan kemudian mengorbankan kerukunan beragama. Dan pada saat yang sama, kita tidak ingin menegakkan kerukunan agama dengan mengorbankan agama. Islam mendambakan kerukunan, tetapi jangan lantas demi kerukunan, agama kita terlecehkan.

c. Kendala Dialog Antarumat Beragama

Ulil Abshar Abdalla dalam artikelnya, “Beberapa Kendala Praktis Dialog Antar Agama”,⁹⁹ menengarai tujuh kendala praktis di lapangan yang menghalangi pertemuan antar umat beragama, yaitu:

1) Elitis

Kendala pertama adalah bahwa wacana mengenai dialog hampir secara merata berlangsung di tingkat elite terpelajar, sehingga lapisan awam yang lebih besar jumlahnya tidak mendapatkan akses yang cukup kepada wacana itu. Ini terjadi, karena dialog lebih dipraktikkan

⁹⁷ Ibid

⁹⁸ Ibid

⁹⁹Ulil Abshar Abdalla “Beberapa Kendala Praktis Dialog Antar Agama” (dimuat dalam harian Kompas, Sabtu 5 agustus 2000. Atau bisa diakses di <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0008/05/opini/bebe04.htm>)

secara "diskursif" ketimbang secara praktis. Penulis kira, jika kita lama terkungkung dalam kesalahan ini, maka akibat-akibatnya bisa fatal. Sementara pada tingkat elite yang seringkali menggauli wacana itu terjadi pertemuan yang seolah-olah akan mempengaruhi tindakan kaum awam yang menjadi pengikut elite tersebut, masyarakat di tingkat akar rumput menghadapi sejumlah masalah konkret yang jarang direfleksikan secara "diskursif" dan partisipatif (maksudnya: melibatkan mereka secara langsung dalam refleksi itu), sehingga mereka mudah terjebak dalam tindakan kekerasan. Saya tentu tidak ingin mengatakan bahwa dialog yang dipraktikkan secara diskursif itu tidak ada gunanya dan tidak menyumbangkan apa-apa terhadap upaya membangun jembatan pertemuan antaragama. Tetapi masalah dialog makin nyata berada pada level akar rumput, sehingga perhatian harus mulai diarahkan ke sana. Dialog sudah selayaknya mulai menyertakan kaum awam, dan tidak melulu menjadi "kemewahan" bagi elite agama yang terpelajar.

2) Tak militan

Kendala kedua adalah bahwa sebagian besar aktivis yang terlibat dalam kegiatan dialog antaragama kurang begitu "agresif" memperjuangkan isu ini. Dibanding dengan sejumlah aktivis lain yang berjuang untuk isu HAM, lingkungan, perempuan, pendidikan sipil (civil education), dan lain-lain, para aktivis dialog antaragama kurang

agresif dalam mengampanyekan isu tersebut. Saya juga melihat kurang adanya "militansi" yang memadai pada mereka untuk menyebarkan isu ini di kalangan masyarakat luas. Ada beberapa sebab yang mungkin menimbulkan hal ini. Pertama, mungkin tidak tersedia cukup funding agency yang membiayai kegiatan-kegiatan dialog antaragama ini di Indonesia. Pihak funding agency mungkin melihat isu-isu lain ketimbang isu dialog antaragama.

Kedua, faktor agama acapkali dipahami sebagai "faktor yang semu" belaka dalam setiap konflik sosial yang pecah melalui simbol agama. Agama dianggap sebagai "bumbu penambah" saja dalam pertengkaran itu, sementara "bumbu utama"-nya adalah faktor-faktor ekonomi-politik. Sekiranya soal-soal ekonomi politik itu bisa diselesaikan, begitu diandaikan, maka secara otomatis konflik itu akan selesai, dan faktor agama akan hilang dengan sendirinya. Ketiga, tampaknya ada semacam keengganan untuk memasuki wilayah dialog antaragama, karena sifatnya yang sensitif.

3) Jalur eceran

Kendala ketiga adalah kenyataan bahwa sosialisasi ajaran agama di tingkat akar rumput lebih banyak dikuasai oleh para juru dakwah yang kurang paham atau menyadari pentingnya isu dialog antaragama. Jalur distribusi ajaran agama di tingkat "eceran" lebih banyak dikuasai oleh jaringan dakwah dan misi yang mempunyai pandangan agama

yang konservatif. Sementara kaum terdidik yang seringkali terlibat dalam wacana dialog antaragama tidak mempunyai basis sosial yang cukup untuk membangun semacam jaringan distribusi ajaran agama alternatif yang menandingi jalur "eceran" yang sudah begitu mengakar itu. Lihatlah misalnya, forum khotbah Jumat, pengajian di surau, majelis taklim, dan sebagainya. Forum-forum sosialisasi agama yang lebih menyentuh masyarakat kecil ini tidak pernah dipikirkan oleh para aktivis dialog antaragama sebagai "titik lemah" dalam membangun dan mengembangkan wacana dialog antaragama. Pertemuan antarelite agama di tingkat atas yang mengesankan adanya kerukunan antaragama seringkali dibatalkan oleh juru dakwah di tingkat bawah yang kurang menyadari pentingnya agenda dialog. Lusinan diskusi, lokakarya dan seremoni yang diadakan untuk membangun dialog seringkali kalah efektif dengan pengajian yang setiap hari diadakan di majelis taklim. Agenda dialog ke depan adalah bagaimana menguasai jalur "eceran" distribusi agama ini sehingga tidak sepenuhnya diisi oleh kaum konservatif yang tidak menyukai dialog.

4) Infrastruktur

Kendala keempat adalah kurangnya sarana-sarana kelembagaan yang menunjang dialog. Ini adalah kelemahan serius yang tidak bisa dibiarkan terus berlanjut. Karena dialog lebih banyak dibangun

melalui seremoni dan tindakan-tindakan intelektual yang bersifat diskursif, maka dialog itu sulit menjangkau ke masyarakat bawah. Saya kira sulit suatu dialog menjadi wacana yang menjangkau masyarakat luas jika "infrastruktur dialog" tidak tersedia. Infrastruktur pokok yang harus tersedia adalah yang berkenaan dengan penyelesaian suatu konflik. Setelah selama sekian tahun, hubungan-hubungan dalam masyarakat mengalami birokratisasi yang menyeragamkan, sejumlah institusi sosial yang dahulu bermanfaat untuk meredam sejumlah konflik yang timbul dalam masyarakat mengalami kerusakan yang cukup serius. Institusi Pela di Maluku, misalnya, sudah tidak lagi mampu menyelesaikan pertikaian mutakhir, karena telah kehilangan daya ikatnya terhadap anggota masyarakat yang dahulu mempercayainya. Akibatnya masyarakat tidak mempunyai sarana yang bersifat kelembagaan untuk menyelesaikan suatu konflik sosial (termasuk konflik agama) secara damai. Saya kira, infrastruktur ini harus segera dibangun untuk mencegah suatu konflik yang muncul di masa-masa mendatang meledak menjadi konflik yang luas dan merusak seluruh tatanan sosial yang ada. Selama infrastruktur semacam ini tak tersedia, maka masyarakat akan dengan mudah menggunakan kekerasan untuk menyelesaikannya.

5) Prasangka

Kendala kelima adanya sejumlah prasangka tertentu yang berkembang di antara sejumlah aktivis yang selama ini bekerja untuk dialog antaragama. Maksud saya adalah, bahwa orang-orang yang mengaku "pluralis" (yakni orang yang setuju dengan adanya dialog antaragama) kadang-kadang juga mempunyai prasangka buruk mengenai kelompok-kelompok konservatif, sehingga dialog antara mereka sulit berlangsung. Hal yang sebaliknya juga terjadi. Masing-masing kelompok menganggap bahwa kelompok lain menganut suatu pemahaman agama yang "sesat" dan "tidak tepat", sehingga tidak layak untuk diajak berbicara.

Akibatnya adalah bahwa wacana dialog hanya berlangsung di antara orang-orang yang memang sudah dari awal percaya akan manfaat dialog, tetapi tidak pernah terjadi antarkelompok "pluralis" dengan kelompok "konservatif". Sebetulnya, penggunaan dua istilah ini juga kurang bermanfaat dari segi pengembangan dialog, karena mengandung prasangka penilaian tertentu. Saya kira sudah saatnya dialog justru diadakan antara dua kelompok ini, sehingga sejumlah masalah yang menjadi bahan perbedaan dan mengganjal bisa diatasi dengan terbuka.

6) Ketidakadilan

Kendala keenam adalah soal kesenjangan sosial dan ketidakadilan. Akhirnya memang soal ketidakadilan dalam

masyarakat harus menjadi "keprihatinan" semua kelompok. Dialog tidak bisa berlangsung dengan sungguh-sungguh jika soal ini tidak diselesaikan secara praktis, sehingga masing-masing kelompok tidak curiga bahwa suatu dialog tidak hanya menjadi "alat politik" untuk menutupi suatu ketidakadilan. Oleh karena itu, suatu dialog memang mensyaratkan sensitivitas yang tinggi terhadap setiap unsur ketidakadilan yang berkembang dalam masyarakat bersangkutan. Dengan kata lain, suatu dialog memang mensyaratkan "basis materiil" yang memadai, di mana kelompok-kelompok yang selama ini mengalami deprivasi ekonomi mendapatkan haknya secara proporsional sebelum pada akhirnya bisa menerima suatu dialog antaragama sebagai opsi yang sungguh-sungguh bisa menyelesaikan masalah. Masalah ini menjadi penting untuk diangkat dalam konteks masyarakat Indonesia di mana masalah dalam hubungan-hubungan antaragama acapkali dipahami sebagai sisi lain dari ketimpangan sosial dalam masyarakat. Kelompok-kelompok "konservatif" yang selama ini menunjukkan sikap yang keras terhadap kelompok lain juga seringkali menggunakan bahasa ketidakadilan ini sebagai alat untuk mengartikulasikan masalah. Bahasa "ketidakadilan" acapkali kita dengar sebagai sarana artikulasi, sehingga kita dapat mengatakan bahwa kemarahan kelompok agama tertentu terhadap kelompok lain

tidak boleh dikatakan sebagai penolakan atas ide pluralitas, tetapi sebagai "protes" atas kesenjangan antarkelompok.

7) Dialog internal

Kendala ketujuh dan terakhir yang ingin saya sebut adalah bahwa seringkali pertikaian antaragama tidaklah suatu pertikaian yang melibatkan seluruh umat dari agama A dengan umat dari agama B. Secara sosiologis, umat beragama tidaklah monolit, tetapi beragam dan mengalami fragmentasi internal yang cukup tajam. Artinya, pluralisme tidak saja terjadi dalam konteks antaragama, tetapi juga dalam agama yang sama juga terjadi perbedaan-perbedaan yang tajam. Seringkali, pertikaian dalam agama yang sama ini menjadi kendala dalam membangun dialog antaragama. Oleh karena itu, dialog antargolongan dalam agama yang sama tak kalah pentingnya dengan dialog antaragama. Dengan kata lain, dialog internal akan menjadi sarana yang memudahkan dialog eksternal, dan bukan sebaliknya. Kadang-kadang dialog antara golongan dalam agama yang sama jauh lebih sulit dan menyakitkan ketimbang dialog dengan kelompok di luar agama sendiri.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disajikan dalam lima bab, dan dari beberapa bab tersebut disusun menjadi beberapa sub bab. Sistematika penulisan tersebut antara lain:

Bab pertama; berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, kajian pustaka, sistematika penulisan, dan metode penelitian. Bab ini digunakan sebagai pedoman, acuan dan arahan sekaligus target penelitian, agar penelitian dapat terlaksana secara terarah dan pembahasannya tidak melebar.

Bab kedua; berisi tentang jawaban dan pembahasan masalah penelitian pertama, yakni tentang bagaimana pandangan perawat di Rumah Sakit Putera Bahagia Kota Cirebon tentang kerukunan antarumat beragama.

Bab ketiga; berisi tentang jawaban dan pembahasan masalah penelitian kedua, yakni tentang bagaimana pandangan perawat tentang konflik antarumat beragama perawat di Rumah Sakit Putera Bahagia Kota Cirebon.

Bab keempat; berisi tentang jawaban dan pembahasan masalah penelitian ketiga, yakni tentang bagaimana pandangan perawat tentang dialog antarumat beragama perawat di Rumah Sakit Putera Bahagia Kota Cirebon.

Bab kelima; adalah bagian terakhir atau penutup. Pada bagian ini berisi tentang kesimpulan dan dilanjutkan dengan saran-saran.

I. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan penelitian lapangan (*field research*), di mana sejumlah data secara mendalam digali di lapangan. Namun sebelumnya penulis juga mengumpulkan bahan kepustakaan, yakni mencari buku-buku yang berhubungan dengan pokok permasalahan, kemudian mengutip beberapa pernyataan dan konsep yang dapat dijadikan acuan penggalan dan analisa data.

2. Lokasi dan Objek Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Rumah Sakit Putera Bahagia Kota Cirebon.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah profesi perawat di lingkungan Rumah Sakit Putera Bahagia Kota Cirebon yang beragama Islam, Katholik dan Protestan.

3. Data dan Sumber Data

a. Data. Data terbagi dua, yaitu:

Data primer adalah data pokok, data primer disini meliputi pandangan perawat tentang kerukunan antarumat beragama, adanya potensi konflik,

dan ada tidaknya dialog antaragama pada perawat rumah sakit Putera Bahagia Kota Cirebon.

Data sekunder atau data pelengkap adalah data kepustakaan yang berasal dari buku, jurnal dan sumber akademik lainnya.

b. Sumber Data

Sumber data yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah :

- a. Responden, yaitu perawat yang sedang bekerja di lingkungan Rumah Sakit Putera Bahagia Kota Cirebon yang beragama Islam, Katholik dan Protestan.
- b. Informan, yaitu pihak yang dapat memberikan keterangan tambahan yang terkait dengan masalah yang diteliti, seperti dokter, kepala keperawatan, kepala ruangan serta petugas rumah sakit yang bekerja sebagai penghubung masyarakat (*humas*) dan pihak lain yang dapat memberikan informasi terhadap masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono,¹⁰⁰ teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi Partisipan (*Participant Observation*)

¹⁰⁰ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, cet. 19 (Bandung: Alfabeta, 2013) hal. 224

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.¹⁰¹ Observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data di mana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.¹⁰² Metode ini menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, terencana secara sistematis sehingga dapat terkontrol kedalamannya dan kesahihannya.¹⁰³

Metode observasi ini peneliti gunakan secara langsung untuk mengamati, mencermati, dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian di Rumah Sakit Putera Bahagia Kota Cirebon, yakni untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua tentang potensi konflik dan pertanyaan ketiga mengenai dialog antarumat beragama.

b. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Wawancara merupakan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara verbal kepada orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi atau penjelasan hal-hal yang dipandang perlu.¹⁰⁴ Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan profesi perawat. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap

¹⁰¹Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, cet. 8 (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 30.

¹⁰²W. Gulo, *Metode Penelitian*, Cet. 5 (Jakarta: PT Grasindo, 2007), hal. 116.

¹⁰³Husaini Usman & Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal. 24

¹⁰⁴Rochiati Wiriamadja, *Metode Penelitian Tindakan Kelas* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008), hal. 117

muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.¹⁰⁵

Metode wawancara mendalam ini digunakan peneliti untuk mendapatkan jawaban dari ketiga pertanyaan penelitian, yakni tentang, pandangan kerukunan, potensi konflik, dan dialog antarumat beragama dilingkungan rumah sakit Putera Bahagia kota Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu.¹⁰⁶ Dalam penelitian ini yang dimaksud dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan jalan melihat catatan yang sudah ada. Metode dokumentasi ini penulis gunakan untuk menguatkan pertanyaan penelitian tentang adanya dialog antarumat beragama di rumah sakit Putera Bahagia kota Cirebon.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisa data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan data-data tersebut ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam sebuah pola, memilih mana yang penting dan yang akan

¹⁰⁵W. Gulo, *Metode...*, hal. 118.

¹⁰⁶*Ibid.*, hal. 123

dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁰⁷

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *analisis deskriptif*, yaitu cara analisis yang menggunakan kata-kata untuk menjelaskan fenomena-fenomena atau data yang diperoleh. Dengan kata lain, penelitian ini ingin menjelaskan fenomena-fenomena realitas atau fakta yang sesungguhnya ada dan dijumpai di lapangan untuk selanjutnya temuan tersebut dituangkan dalam kalimat-kalimat yang sistematis dan dapat direpresentasikan secara ilmiah. Aktivitas dalam analisis data tersebut meliputi:¹⁰⁸

- a. Reduksi data; mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya. Peneliti menelaah kembali seluruh catatan yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.
- b. Penyajian data; setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah *men-display* data. Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan sebagainya secara sistematis sehingga memudahkan memahami apa yang terjadi.

¹⁰⁷Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hal. 244

¹⁰⁸*Ibid.*, hal. 247-252

- c. Verifikasi data atau penarikan kesimpulan, yakni melakukan pencarian makna dari data yang dikumpulkan secara lebih teliti. Hal ini dilakukan dengan memperoleh suatu kesimpulan yang tepat dan akurat. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mencari pola, bentuk, tema, hubungan, persamaan dan perbedaan, faktor yang mempengaruhi dan sebagainya.¹⁰⁹

6. Pengecekan Keabsahan Data

Upaya untuk memperoleh kebenaran data yang diperoleh baik melalui data primer maupun data sekunder, maka diperlukan adanya pengecekan data. Hal ini perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Pengecekan keabsahan data merupakan suatu langkah untuk mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data penelitian yang tentunya akan berimbas terhadap hasil akhir dari suatu penelitian. Oleh sebab itu, maka dalam proses pengecekan keabsahan data pada penelitian ini harus melalui beberapa teknik pengujian data. Adapun teknik pengecekan keabsahan yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

a. Perpanjangan Keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan peneliti dalam melakukan penelitian sangat penting karena hal ini akan membuat penelitian yang dilakukannya

¹⁰⁹Djuju Sudjana, *Evaluasi Penelitian Luar Sekolah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 215.

memiliki bobot yang baik karena didukung dengan pengalaman langsung dari peneliti.

Realitas diatas tentu berdasar pada konsepsi Lexy Moeloeng yang menjelaskan bahwa peneliti dalam peneliti kualitatif adalah instrumen itu sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian. Perpanjangan keikutsertaan ini berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai.¹¹⁰

Berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan ini, peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian dan mengikuti serta mengamati proses keberagaman perawat dengan maksud untuk menguji ketidakbenaran informasi yang diperkenalkan oleh peneliti sendiri atau responden serta membangun kepercayaan terhadap subyek.

b. Ketekunan Pengamatan

Hal lain yang perlu dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian adalah ketekunan pengamatan. Ketekunan pengamatan dimaksudkan untuk menentukan data dan informasi yang relevan dengan persoalan yang sedang dicari oleh peneliti, kemudian peneliti memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

¹¹⁰ Lexy Moeleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosadakarya. 2004), hal. 327

c. Trianggulasi

Peneliti, dalam pengecekan keabsahan data pada penelitian ini, juga menggunakan trianggulasi, yaitu teknik pemeriksaan data memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut bagi keperluan pengecekan atau sebagai bahan pembanding terhadap data tersebut. Untuk pengecekan data melalui pembandingan terhadap data dari sumber lainnya.¹¹¹

Konsepsi diatas menginspirasi penulis dalam penelitian ini, menggunakan teknik trianggulasi, teknik trianggulasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh dari lapangan atau yang disebut data primer dengan data sekunder yang didapat dari beberapa dokumen-dokumen serta referensi buku-buku yang membahas hal yang sama.

7. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan penulis pada penelitian ini meliputi tiga tahapan yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan terakhir tahap penyelesaian.

a. Tahap Persiapan

¹¹¹Lexy Moeleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif..*, hal. 330

Peneliti melakukan observasi pendahuluan untuk memperoleh gambaran umum serta permasalahan yang sedang dihadapi tentang penerapan nilai-nilai kerukunan beragama pada profesi perawat.

Observasi tersebut berguna sebagai bahan acuan dalam pembuatan proposal tesis dan pengajuan judul tesis, untuk memperlancar pada waktu tahap pelaksanaan penelitian maka peneliti mengurus surat izin penelitian dari Direktur Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Setelah persiapan administrasi selesai, maka peneliti membuat rancangan atau desain penelitian agar penelitian yang dilakukan lebih terarah.

Selain itu, peneliti juga membuat pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan dicari jawabannya atau pemecahannya, sehingga data yang diperoleh lebih sistematis dan mendalam.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan kegiatan inti dari suatu penelitian, karena pada tahap pelaksanaan ini peneliti mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan. Tahap pelaksanaan ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yakni:

Pertama, peneliti melakukan pencarian terhadap dokumen-dokumen resmi yang akan dipergunakan dalam penelitian dan wawancara guna memperoleh data awal tentang kegiatan apa saja yang telah dilakukan para perawat kaitannya dengan penerapan nilai-nilai kerukunan beragama.

Kedua, mengadakan observasi langsung terhadap bentuk, upaya dan faktor pendukung dan penghambat pada penerapan nilai-nilai kerukunan beragama pada perawat.

Ketiga, peneliti melakukan wawancara dengan Direktur, Kepala Keperawatan, Kepala Ruangan, staf perawat di tiap ruang perawatan tentang penerapan nilai-nilai kerukunan beragama ditengah profesi keperawatan.

Keempat, peneliti melakukan pengecekan kembali terhadap data hasil penelitian agar dapat diketahui hal-hal yang masih belum terungkap atau masalah yang terlewatkan.

Kelima, peneliti melakukan perpanjangan penelitian guna melengkapi data yang kurang hingga memenuhi target dan lebih valid terhadap data yang diperoleh.

c. Tahap penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahap yang paling akhir dari sebuah penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun data yang telah dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yaitu berupa laporan penelitian dalam bentuk tesis dengan mengacu pada pedoman penulisan karya ilmiah yang berlaku di Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon